



KABUPATEN DHARMASRAYA 2024-2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Dokumen ini dapat diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini memuat tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Dharmasraya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rencana kontingensi merupakan bagian dari konsep manajemen resiko bencana sebagai upaya mitigasi yang berupa dokumen sebagai pelengkap rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Rencana kontingensi merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk kesiapsiagaan bencana. Untuk menyiapkan segala sesuatu apabila bencana banjir tersebut benar terjadi maka perlu dilakukan penyusunan rencana kontingensi.

Metode yang digunakan adalah dengan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa stakeholder, yang terkait dengan kesehatan, informasi, transportasi, konstruksi, sosial, termasuk lembaga terkait lainnya. Berdasarkan hasil FGD, dokumen rencana kontingensi disusun melibatkan beberapa langkah, yaitu penilaian bahaya, penentuan kejadian bahaya, penentuan skenario, penentuan kebijakan, dan perencanaan alokasi sektoral.

Perencanaan alokasi sektoral dibagi dalam manajemen dan koordinasi, Kesehatan, Penyelematan/Perlindungan/Evakuasi, Transportasi, Logistik dan Dapur Umum, Sarana dan Prasarana. Keenam sektor tersebut bergerak atas instruksi Bupati Dharmasraya atau yang ditunjuk, dengan koordinasi utama ada pada sektor manajemen dan koordinasi. Selain itu, bila ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya seperti kurangnya kantong mayat, alat evakuasi, tenaga medis, dll. Sedangkan apabila ada yang telah melebihi kebutuhan adalah terkait dengan jumlah tenaga relawan.

Demikian rencana kontingensi banjir ini disampaikan, Dengan harapan agar dokumen yang dihasilkan dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terintegrasi sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya dalam penanggulangan Bencana.

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Dharmasraya

ELDISON, ST., MM
NIP. 197307122005011012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB 1. Situasi	7
1.1. Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)	7
1.2. Skenario Kejadian	12
1.2.1. Skenario Curah Hujan Tinggi	12
1.2.2. Skenario Curah Hujan Moderat dengan Intensitas Sporadis	12
1.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi	13
1.3. Asumsi Dampak	14
BAB 2. Tugas Pokok	17
2.1. Tugas Pokok	17
2.2. Sasaran	17
2.3. Fungsi	17
2.4. Uraian Tugas	18
2.5. Struktur	18
BAB 3. Pelaksanaan	19
3.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)	19
3.2. Fungsi	22
3.3. Tugas-tugas	23
3.3.1. Uraian Tugas Pos Komando Lapangan/Kecamatan	24
3.3.2. Uraian Tugas Pemangku Kebijakan	27
3.4. Pelaksanaan Tugas	28
3.5. Instruksi Koordinasi	30
BAB 4. Administrasi dan Logistik	33
4.1. Administrasi	33
4.1.1. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab:	33
4.1.2. Tujuan Struktur Organisasi	34
4.2. Prosedur Operasional Standar (SOP):	34
4.3. Logistik	36
BAB 5. Komando, Kendali dan Komunikasi	38
5.1. Koordinasi dan Komando	38
5.1.1. Struktur Organisasi	38
5.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab	39
5.1.3. Mekanisme Koordinasi	39
5.2. Struktur Organisasi Komando	40
5.3. Kendali	40
5.4. Koordinasi	40
5.5. Komunikasi	41
5.6. Informasi	41
Lampiran - A: Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana	42
Lampiran - B: Susunan Tugas	43
Lampiran - C: Jaring Komunikasi	46
Lampiran - D: Estimasi Ketersediaan & Kebutuhan Sumberdaya	47

Lampiran - E: Peta	50
Lampiran - F: SOP	51
Lampiran - G: Lembar Komitmen.....	61
Lampiran - H : Profil Lembaga/Organisasi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	8
Gambar 1-2 Peta Wilayah Risiko Banjir Kabupaten Dharmasraya.....	14
Gambar 5-1 Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana (TDB)	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	8
Tabel 1-2 Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2023	9
Tabel 1-3 Ringkasan Skenario Kejadian	13
Tabel 1-4 Asumsi Dampak	15
Tabel 3-1 Uraian Fungsi Pos Komando Lapangan/Kecamatan	24
Tabel 3-2 Uraian Tugas Tim Poko Lapangan.....	28

BAB 1. SITUASI

1.1. Karakteristik Bahaya Bencana (Ancaman)

Bencana alam di wilayah Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang selalu dihadapi setiap tahun. Salah satu bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yakni banjir. Bencana alam hidrometeorologi sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan wilayah tropis. Kondisi iklim di wilayah tropis dapat dicirikan dengan kondisi curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Berdasarkan penyebabnya, banjir di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Banjir yang disebabkan oleh hujan dalam periode yang panjang dengan intensitas rendah.
2. Banjir bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan dengan intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai.
3. Banjir yang disebabkan oleh pasang surut atau air balik (back water) pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai.

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari.

Berdasarkan analisis risiko bencana yang telah dilakukan, salah satu ancaman bencana yang dihadapi oleh warga Kabupaten Dharmasraya adalah Banjir. Dari catatan sejarah kejadian banjir di Kabupaten Dharmasraya hampir terjadi setiap tahunnya. Terdapat aliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu aliran Batang Timpeh, Batanghari dan Batang Siat, Batang Momong, Batang Pangian, Batang Piruko, Batang Nabuan dan Batang Lago dimana kawasan hilir sungai tersebut memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir.

Peristiwa banjir yang berdampak luas di Kabupaten Dharmasraya yang terjadi pada tahun 2023 akibat curah hujan harian yang tinggi dimana berdasarkan data BPBD Dharmasraya, banjir merendam rumah tempat tinggal, sekolah, sarana ibadah, sarana kesehatan, akses jalan, Jembatan, sarana pertanian, sarana perikanan dan sarana perkebunan.

Mengacu pada kondisi dan situasi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan upaya dengan menyusun perencanaan dan kebijakan dalam melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Salah satunya adalah Perencanaan Kontinjensi Banjir di Kabupaten Dharmasraya. Perencanaan Kontinjensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan. Rencana ini diharapkan dapat menjadi Pedoman pada saat menghadapi darurat bencana bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya sehingga semua sumber daya yang ada dapat termobilisasi dan terkordinasi dengan baik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat bencana.

Potensi banjir di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi dua aspek utama yaitu:

1. banjir yang disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi sehingga saluran drainase dan sungai meluap;
2. banjir hulu Sungai Batanghari yang disebabkan curah hujan tinggi di daerah hulu, yaitu Solok, Solok Selatan sehingga sungai meluap;

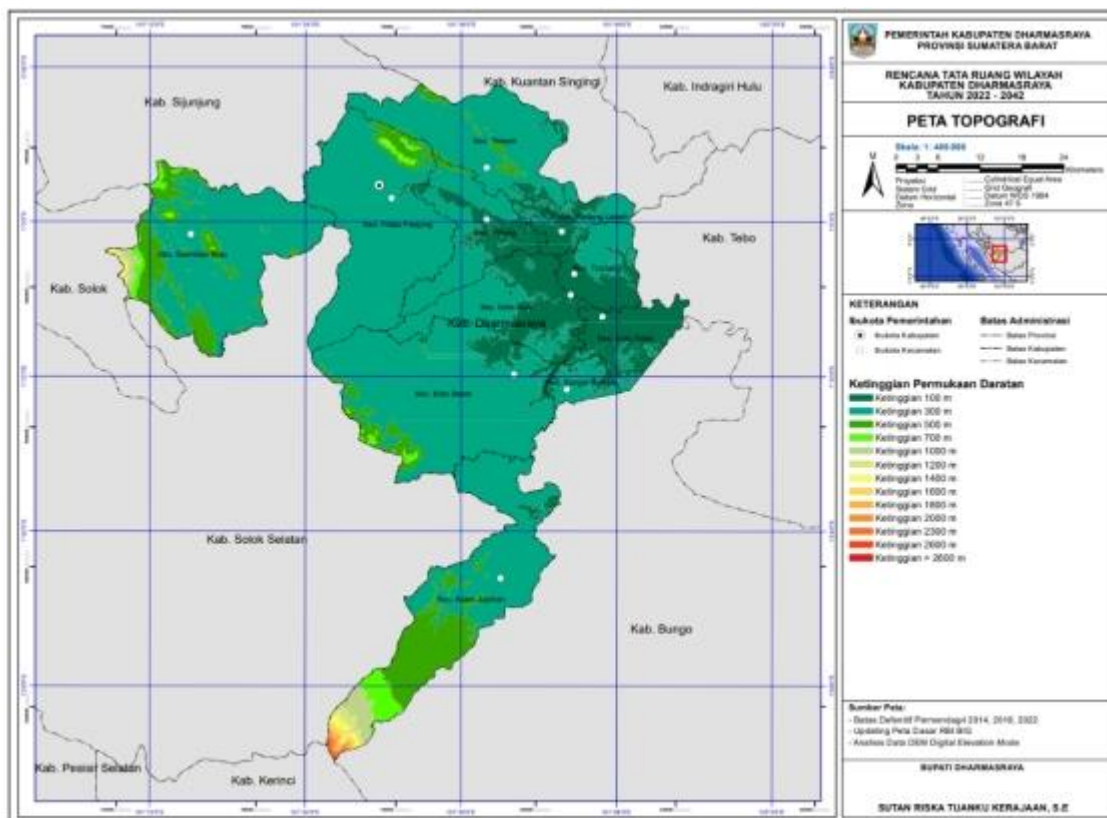
Potensi banjir tersebut terkait dengan karakteristik wilayah Dharmasraya – khususnya yang berada di aliran Sungai cenderung datar sebagaimana disajikan pada tabel dan peta berikut .

Tabel 1-1 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

No	Klasifikasi Kemiringan Lereng	Tingkat Kemiringan	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 2,99 %	74,378	25.46
2	Agak Landai	3 – 7,99 %	134,367	46.00
3	Landai	8 – 14,99 %	35,852	12.27
4	Agak Curam	15 – 24,99 %	22,829	7.82
5	Curam	25 – 45 %	18,663	6.39
6	Sangat Terjal	>45 %	6,031	2.06
Jumlah			292.120	52

Sumber: RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Gambar 1-1 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023-2043

Sebenarnya persoalan banjir di Dharmasraya bukanlah perihlah baru. Hampir setiap tahun, bencana tersebut selalu terjadi di berbagai penjuru kabupaten. Data tentang kejadian bencana banjir tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 1-2 Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2023. Berdasarkan data 1 tahun terakhir, kecamatan Timpeh, Sembilan Koto dan Pulau Punjung merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian terbanyak, disusul kecamatan Padang Laweh, Sitiung, dan Koto Baru. Sedangkan jika dilihat nagari terdampak bencana selama 1 tahun terakhir, terdapat beberapa nagari yang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 1-2 Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dan 2023

No	Tahun	Kecamatan	Nagari	Jenis Bencana
1	2020	Pulau Punjung	Gunung Salasih	Banjir
2	2020	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Banjir
3	2020	Pulau Punjung	Empat Koto Pulau Punjung	Banjir
4	2020	Koto Besar	Abai Siat	Banjir
5	2020	Koto Besar	Bonjol	Banjir
6	2020	Timpeh	Panyubarangan	Banjir
7	2020	Timpeh	Taratak Tinggi	Banjir
8	2020	Timpeh	Tabek	Banjir
9	2020	Sembilan Koto	IV Koto Dibawuah	Banjir
10	2020	Sembilan Koto	Banai	Banjir
11	2020	Sembilan Koto	Silago	Banjir
12	2020	Padang Laweh	Sopan Jaya	Banjir
13	2020	Koto Salak	Pulau Maianan	Banjir
14	2020	Koto Baru	Koto Baru	Banjir
15	2020	Koto Baru	Sialang Gaung	Banjir
16	2020	Koto Baru	Koto Padang	Banjir
17	2020	Koto Baru	Ampang Kuranji	Banjir
18	2020	Sitiung	Gunung Medan	Banjir
19	2020	Sembilan Koto	IV Koto Dibawuah	Banjir
20	2020	Pulau Punjung	Gunung Selasih	Banjir
21	2020	Pulau Punjung	Sikabau	Banjir
22	2020	Pulau Punjung	Gunung Selasih	Banjir
23	2020	Sembilan Koto	IV Koto Dibawuah	Banjir
24	2020	Timpeh	Taratak Tinggi	Banjir
1	2021	Asam Jujuhan	Tanjung Alam	Banjir
2	2021	Pulau Punjung	Gunung Selasih	Banjir
3	2021	Pulau Punjung	Nagari Sungai Kambut	Banjir
4	2021	Pulau Punjung	Sikabau	Banjir
5	2021	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Banjir
6	2021	Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	Banjir
7	2021	Sitiung	Sungai Duo	Banjir
8	2021	Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	Banjir
9	2021	Padang Laweh	Sopan Jaya	Banjir
10	2021	Tiumang	Tiumang	Banjir
11	2021	Koto Besar	Abai Siat	Banjir
12	2021	Koto Besar	Bonjol	Banjir
13	2021	Koto Besar	Abai Siat	Banjir
14	2021	Koto Baru	Ampang Kuranji	Banjir

15	2021	Sitiung	Gunug Medan	Banjir
16	2021	Koto Besar	Abai Siat	Banjir
17	2021	Koto Salak	Koto Salak	Banjir
1	2022	Pulau Punjung	Gunung Selasih	Banjir
2	2022	Padang Laweh	Sopan Jaya	Banjir
3	2022	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Banjir
1	2023	Padang Laweh	Sopan Jaya	Banjir
2	2023	Timpeh	Taratak Tinggi	Banjir
3	2023	Timpeh	Timpeh	Banjir
4	2023	Timpeh	Tabek	Banjir
5	2023	Timpeh	Panyubarangan	Banjir
6	2023	Timpeh	Ranah Palabi	Banjir
7	2023	Timpeh	Taratak Tinggi	Banjir
8	2023	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Banjir
9	2023	Pulau Punjung	Sungai Dareh	Banjir
10	2023	Timpeh	Timpeh	Banjir
11	2023	Timpeh	Panyubarangan	Banjir
12	2023	Timpeh	Ranah Palabi	Banjir
13	2023	Pulau Punjung	Sikabau	Banjir
14	2023	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Banjir
15	2023	Koto Baru	Koto Baru	Banjir
16	2023	Sitiung	Sungai Duo	Banjir
17	2023	Koto Baru	Ampang Kuranji	Banjir
18	2023	Timpeh	Tabek	Banjir
19	2023	Timpeh	Ranah Palabi	Banjir
20	2023	Padang Laweh	Sopan Jaya	Banjir
21	2023	Padang Laweh	Muaro Sopan	Banjir
22	2023	Sitiung	Gunung Medan	Banjir
23	2023	Sembilan Koto	Banai	Banjir & Longsor
24	2023	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Banjir
25	2023	Sembilan Koto	Silago	Banjir
26	2023	Sembilan Koto	Banai	Banjir
27	2023	Sembilan Koto	Empat Koto Dibawuah	Banjir
28	2023	Sembilan Koto	Lubuk Karak	Banjir
29	2023	Timpeh	Tabek	Banjir

Sumber : BPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Merancang Rencana Kontijensi Bencana Banjir untuk Kabupaten Dharmasraya melibatkan beberapa langkah strategis dan operasional untuk mempersiapkan, merespons, dan memulihkan dari dampak banjir. Berikut adalah rencana kontijensi yang komprehensif:

1. Analisis Risiko Banjir

- Melakukan pemetaan wilayah yang rentan terhadap banjir, terutama di daerah aliran sungai besar seperti Sungai Batang Hari dan anak-anak sungainya.
- Mengkaji data historis mengenai frekuensi, intensitas, dan dampak banjir di wilayah tersebut.

- Mempertimbangkan faktor-faktor seperti curah hujan, perubahan tata guna lahan, dan kondisi drainase.

2. Pencegahan dan Mitigasi

- Menyusun peraturan tentang penggunaan lahan di daerah rawan banjir, termasuk pengendalian pembangunan.
- Membangun dan memelihara infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, saluran drainase, dan kolam retensi.
- Melakukan reboisasi dan pelestarian daerah aliran sungai untuk mengurangi risiko banjir.

3. Persiapan dan Kesiapsiagaan

- Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi tepat waktu kepada masyarakat.
- Mengadakan latihan evakuasi dan simulasi penanganan bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan tim respons.
- Menyediakan stok logistik darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan di lokasi yang mudah dijangkau.

4. Respon Darurat

- Membentuk Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) untuk mengkoordinasikan tindakan respons dengan instansi terkait.
- Melakukan evakuasi terencana dan terkoordinasi dari daerah yang terkena dampak ke lokasi pengungsian yang aman.
- Menyediakan bantuan medis, penyelamatan, dan pertolongan pertama bagi korban banjir.

5. Pemulihan dan Rekonstruksi

- Memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat banjir.
- Menyediakan dukungan psikososial bagi masyarakat yang terdampak untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka.
- Memberikan bantuan ekonomi dan dukungan bagi usaha kecil dan petani untuk memulihkan mata pencaharian mereka.

6. Koordinasi dan Kerjasama

- Bekerjasama dengan instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk memastikan respons yang komprehensif.
- Mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana kontijensi.

7. Pemantauan dan Evaluasi

- Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas rencana kontijensi dan memperbaruinya berdasarkan pelajaran dari kejadian banjir sebelumnya.
- Menyusun laporan berkala tentang upaya penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Rencana kontigensi ini dirancang untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di Kabupaten Dharmasraya, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait dan partisipasi aktif dari masyarakat.

1.2. Skenario Kejadian

Untuk menyusun skenario kemungkinan kejadian banjir di Kabupaten Dharmasraya pada bulan Januari dan Februari 2025, kita akan mempertimbangkan data prakiraan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta analisis risiko terkait. Berikut adalah skenario yang dapat terjadi:

1.2.1. Skenario Curah Hujan Tinggi

Deskripsi:

Prakiraan BMKG Curah hujan diprediksi berada di atas rata-rata dengan intensitas tinggi selama bulan September s/d desember. BMKG mengindikasikan potensi hujan lebat lebih dari 200 mm per bulan di beberapa daerah di Dharmasraya.

Dampak Potensial:

- a) Sungai Meluap
Sungai Batang Hari dan anak sungainya berpotensi meluap akibat peningkatan volume air.
- b) Daerah Rawan
Daerah dataran rendah dan wilayah pemukiman di dekat sungai berisiko tinggi mengalami genangan air.
- c) Kerusakan Infrastruktur
Kerusakan pada jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat terjadi akibat derasnya aliran air dan genangan.

Mitigasi:

- a) Mengaktifkan sistem peringatan dini dan evakuasi bagi warga di daerah rawan.
- b) Menyiapkan lokasi pengungsian sementara dengan fasilitas dasar.
- c) Memastikan ketersediaan logistik dan bantuan medis di pos-pos darurat.

1.2.2. Skenario Curah Hujan Moderat dengan Intensitas Sporadis

Deskripsi:

Prakiraan BMKG Curah hujan rata-rata dengan intensitas hujan sporadis namun tidak berkelanjutan. Hujan terjadi sesekali dengan potensi tinggi untuk terjadi hujan deras sesaat.

Dampak Potensial:

- a) Terjadi genangan sementara di daerah yang memiliki sistem drainase kurang baik.

- b) Aktivitas harian dan ekonomi sedikit terganggu, terutama di daerah perdagangan dan transportasi.

Mitigasi:

- a) Pemeliharaan sistem drainase untuk memastikan kelancaran aliran air.
- b) Sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap waspada dan memperhatikan informasi cuaca terkini.
- c) Koordinasi dengan dinas pekerjaan umum untuk memantau dan membersihkan saluran air dari sampah dan sedimentasi.

1.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a) Pemantauan Berkala

Melakukan pemantauan dan evaluasi situasi cuaca secara berkala dengan memperhatikan laporan BMKG dan data lapangan.

b) Kesiapan Tanggap Darurat

Memastikan kesiapan personel dan sumber daya untuk tanggap darurat, termasuk peralatan dan perlengkapan evakuasi.

c) Edukasi Masyarakat

Meningkatkan edukasi dan latihan kesiapsiagaan bagi masyarakat untuk menghadapi situasi banjir.

Dengan skenario dan tindakan mitigasi ini, Kabupaten Dharmasraya dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan kejadian banjir, meminimalkan dampak, dan melindungi warga dari bahaya yang mungkin terjadi.

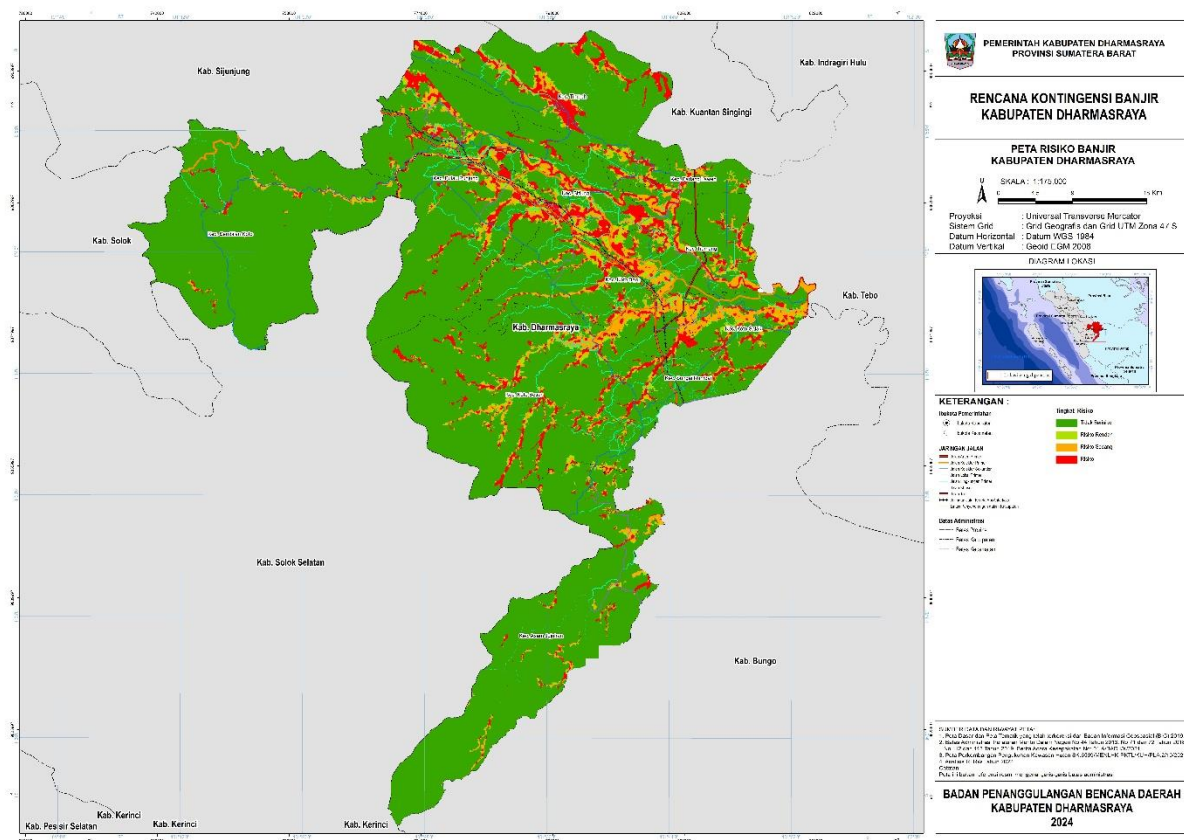
Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan prediksi skenario kondisi banjir untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Tabel 1-3 Ringkasan Skenario Kejadian

Asumsi Waktu Kejadian	September - Desember
Lokasi banjir	✓ Kecamatan Pulau Punjung ✓ Kecamatan Timpeh ✓ Kecamatan Koto Besar ✓ Kecamatan Padang Laweh ✓ Kecamatan Koto Salak ✓ Kecamatan Koto Baru ✓ Kecamatan Asam Jujuhan ✓ Kecamatan Sembilan Koto ✓ Kecamatan Sitiung ✓ Kecamatan Tiumang ✓ Kecamatan Sungai Rumbai

Asumsi Waktu Kejadian	September - Desember
Cakupan Wilayah Terdampak	Merata kesemua nagari yang ada
Bahaya Primer	Kerusakan yang terjadi diakibatkan genangan air
Bahaya Sekunder	▪ Masyarakat menjadi rentan mengalami sakit diantaranya Dehidrasi, Diare, ISPA, Gatal –Gatal dan Persendian; ▪ Lingkungan yang rusak menyebabkan ekosistem terganggu sehingga binatang liar berkeliaran seperti Ular dll; ▪ Ketersediaan air bersih; ▪ Korsleting listrik; ▪ Penumpukan sampah;
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk terdampak 20.000 jiwa dengan laki-laki 8.000 jiwa dan perempuan 12.000

Gambar 1-2 Peta Wilayah Risiko Banjir Kabupaten Dharmasraya



1.3. Asumsi Dampak

Berdasarkan analisa data diketahui bahwa wilayah terdampak Banjir dengan Risiko Tinggi hanya seluas 20,330.12 Ha (6,96%) dari total Luas Kabupaten Dharmasraya, sedangkan hampir sebahagian besar Kabupaten Dharmasraya (83.88%) atau seluas 245,037.11 Ha. Berdasarkan luas permukiman yang terdampak banjir baik risiko rendah dan sedang mencapai 2,826.21 Ha dengan

risiko sedang paling luas sebesar 1.656,39 Ha. sebagaimana tersaji di tabel berikut.

Kriteria Kerentanan	Non Permukiman	Permukiman	%	Grand Total	%
Tidak Berisiko	240,415.33	4,621.78	62.05%	245,037.11	83.88%
Rendah	2,300.41	252.68	3.39%	2,553.09	0.87%
Sedang	22,543.40	1,656.39	22.24%	24,199.79	8.28%
Tinggi	19,412.98	917.14	12.31%	20,330.12	6.96%
Total	284,672.11	7,447.99		292,120.10	

Dengan melihat sejarah banjir yang sering terjadi di Kabupaten Dharmasraya menjadi dasar dalam merumuskan Asumsi dampak yang ditimbulkan.

Tabel 1-4 Asumsi Dampak

Aspek	Asumsi Dampak
Kependudukan	✓ Meninggal dunia: jiwa ✓ Mengungsi: jiwa (laki-laki, perempuan, balita,) ✓ Luka-luka: orang , dengan rincian sbb: • Luka berat: orang • Luka sedang: orang • Luka ringan: orang
Fisik & Infrastruktur	❖ Rumah terdampak yang rusak: unit; rusak sedang : unit; rusak ringan : unit ❖ Bangunan sekolah sebanyakunit (SMPN, SDN,) ❖ Bangunan Rumah Ibadah : unit (Masjid,)
Ekonomi	➤ Pedagang kecil (..... warung) : aktivitas jual beli terhenti dan pasokan terhenti. ➤ Usaha rumah tangga (12 unit) : tidak dapat beroperasi.
Lingkungan	• Air : Kurangnya sumber air bersih karena terkontaminasi dengan air kotor dari banjir. • Lahan: Lingkungan menjadi kotor akibat penumpukan lumpur. Akses jalan akan terganggu, menyulitkan proses evakuasi.
Pelayanan Sipil dan Pemerintah	▪ Pelayanan Pendidikan di sekolah terganggu karena gedung sekolah tidak dapat digunakan akibat terdampak banjir atau akses ke lokasi tertutup banjir

BAB 2. TUGAS POKOK

2.1. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Banjir Kabupaten Dharmasraya bertugas merencanakan dan melaksanakan operasi pendukung dan pendampingan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengkoordinir penanganan wilayah terdampak.

Operasi penanganan darurat bencana banjir dan tugas kemanusiaan dilakukan selama 30 hari atau dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan situasi di lapangan yang dijalankan oleh SKPD Kabupaten Dharmasraya melalui Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) dan Pos Lapangan PDB. Posko PDB berada di tingkat Kecamatan sedangkan Pos Lapangan PDB di tingkat Nagari yang berada di wilayah terdampak bencana, sedangkan Pos Pendamping PDB berada di tingkat Kabupaten.

Penanganan dilakukan secara cepat dan terpadu dengan memprioritaskan efektivitas dan keterpaduan kebijakan strategi penanganan, pengendalian, koordinasi, penguatan kapasitas, dan mobilisasi sumberdaya sesuai dengan asas dan prinsip penanggulangan kedaruratan bencana dengan meminimalisir dampak ekonomi pasca bencana.

2.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana banjir dalam waktu +/- 24 jam;
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 5 unsur pentahelix;
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dengan menjalankan fungsi OPD;
4. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak;
5. Terlaksananya pengerahan sumberdaya dari masing-masing OPD yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana;
6. Terlaksananya 100% evakuasi masyarakat terdampak atau korban sesuai dengan protokol penanganan bencana;
7. Terselenggaranya pemulihan fasilitas publik sementara (rehabilitasi) sarana prasarana vital meliputi listrik, air, dan jaringan komunikasi;
8. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan bertanggung gugat penuh.

2.3. Fungsi

Pos komando lapangan tanggap darurat bencana Kecamatan berfungsi :

1. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Lapangan Kecamatan
2. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh

instansi/organisasi terkait Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten Dharmasraya;

3. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadi wilayah kerja Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Kecamatan.

2.4. Uraian Tugas

Uraian tugas Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana Kecamatan adalah :

1. Melakukan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat Kecamatan;
2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
3. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
4. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan;
5. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;
6. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

2.5. Struktur

Struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya :

1. Komandan Posko Lapangan (CAMAT),
2. Wakil Komandan Posko Lapangan (DAN RAMIL Kecamatan)
3. Wakil Komandan Posko Lapangan (KAPOLSEK Kecamatan)
4. Sekretariat (SEKRETARIS Kecamatan)
5. TRC Kecamatan, Babinsa & Babinkamtibmas
6. Urusan Keamanan
7. Urusan Logistik & Peralatan
8. Urusan Layanan Kesehatan
9. Urusan Personil Evakuasi dan SAR
10. Urusan Tempat Evakuasi Sementara
11. Urusan Komunikasi & Informasi
12. Urusan Dapur Umum

BAB 3. PELAKSANAAN

3.1. Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Pada saat terjadi bencana (darurat bencana) sering terjadi situasi kesimpangsiuran data dan informasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggap darurat juga mengalami miskordinasi dimana pergerakan operasional masih cenderung parsial, distribusi bantuan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik, sehingga kemajuan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kurang terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

Dalam kondisi seperti ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah membentuk Pusat Komando Kedaruratan Bencana di Tingkat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos komando tanggap darurat bencana dilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana berbasis Kecamatan yang merupakan satu, kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana yang tertuang dalam Rencana Kontijensi Kabupaten Dharmasraya berbasis Kecamatan yang dalam pelaksanaannya akan mendekatkan Kecamatan dengan wilayah terdampak sehingga langkah langkahnya lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

Ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam menangani bencana banjir di wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan mendasarkan pada perencanaan Kontingensi berbasis Kecamatan dalam kerangka waktu yang lebih cepat dan responsif dalam memobilisasi sumber daya di wilayah nagari terdampak bencana banjir. Begitu juga probabilitas yang lebih besar dukungan dari nagari lain yang tidak terkena banjir dapat melakukan bantuan ke nagari terdampak.

Operasi Tanggap Darurat bencana berbasis Kecamatan juga mempertimbangkan jangkauan wilayah Kabupaten yang cukup luas , sehingga jika bertumpu pada Kabupaten/BPBD maka dapat dipastikan layanan Penanganan Bencana yang diberikan menjadi sangat tidak optimal, apalagi yang terdampak bencana banjir meliputi beberapa Kecamatan.

Status keadaan darurat bencana (terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), Penetapan status Keadaan Darurat bencana dilakukan oleh Bupati Dharmasraya atas usul Kepala BPBD Kab. Dharmasraya berdasarkan Kajian cepat bersama instansi terkait yang telah dilakukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Dharmasraya yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun ke Pemerintah Pusat (BNPB).

Ruang lingkup operasi tanggap darurat dan rencana tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang telah ditentukan (periode operasi) berdasarkan pernyataan Keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya. Tindakan ini fokus pada status Keadaan darurat dan fase (tahapan) Keadaan darurat yang sesuai skenario kejadian. Setiap tahap dijabarkan dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan skenario banjir yang telah disepakati bersama.

Menyusun Konsep Operasi (Rencana Tindakan) dalam Rencana Kontijensi Bencana Banjir untuk Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan respon yang cepat terhadap kejadian banjir. Berikut adalah konsep operasi yang dapat diterapkan:

Konsep Operasi (Rencana Tindakan) Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya

A. Tahap Persiapan

1. Koordinasi dan Komunikasi:

- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan instansi terkait.
- ✓ Menyiapkan saluran komunikasi darurat yang selalu aktif.
- ✓ Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang status siaga banjir.

2. Sumber Daya dan Logistik:

- ✓ Menyiapkan peralatan evakuasi seperti perahu karet, jaket pelampung, dan kendaraan evakuasi.
- ✓ Menyediakan logistik darurat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan medis.

B. Tahap Siaga (Pra-bencana)

1. Pemantauan dan Peringatan Dini:

- ✓ Melakukan pemantauan cuaca dan debit air sungai secara terus-menerus.
- ✓ Mengaktifkan sistem peringatan dini dan menyebarkan informasi melalui sirene, media sosial, dan SMS.

2. Edukasi dan Latihan:

- ✓ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat banjir.
- ✓ Mengadakan latihan evakuasi bersama masyarakat dan simulasi penanganan banjir.

3. Persiapan Tempat Pengungsian:

- ✓ Menyiapkan lokasi pengungsian yang aman dan cukup jauh dari daerah rawan banjir.
- ✓ Melengkapi tempat pengungsian dengan fasilitas dasar seperti sanitasi, dapur umum, dan tempat tidur.

C. Tahap Saat Bencana (Tanggap Darurat)

1. Aktivasi Pusat Komando

- ✓ Mengaktifkan Pusdalops untuk memantau situasi, mengkoordinasikan respon, dan memberikan laporan kepada pemerintah daerah dan penerintah provinsi maupun pemerintah pusat (BNPB).

2. Operasi Penyelamatan dan Evakuasi
 - ✓ Menggerakkan tim penyelamat untuk mengevakuasi warga dari daerah berisiko tinggi ke lokasi pengungsian yang aman.
 - ✓ Menyiapkan jalur evakuasi yang aman dan memastikan adanya penunjuk arah yang jelas.
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - ✓ Menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir di lokasi pengungsian.
 - ✓ Menyediakan layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi korban di lokasi pengungsian.
4. Komunikasi dan Informasi
 - ✓ Memberikan informasi terkini tentang kondisi banjir, langkah-langkah yang harus diambil, dan status evakuasi kepada masyarakat.

D. Tahap Pasca-Bencana (Pemulihan)

1. Penilaian Dampak
 - ✓ Evaluasi Kerusakan: Melakukan penilaian cepat terhadap kerusakan infrastruktur, rumah, dan lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya.
 - ✓ Data dan Pelaporan: Mengumpulkan data dampak banjir untuk pelaporan dan analisis lebih lanjut.
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - ✓ Perbaikan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur yang rusak, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
 - ✓ Dukungan Ekonomi: Memberikan bantuan kepada petani dan usaha kecil untuk memulihkan mata pencaharian mereka.
3. Pemulihan Sosial
 - ✓ Dukungan Psikososial: Memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi korban banjir.
 - ✓ Kampanye Kesadaran: Mengadakan kampanye kesadaran tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di masa depan.

E. Evaluasi dan Pembelajaran

1. Review Pasca-Bencana
 - ✓ Mengadakan sesi evaluasi untuk menilai efektivitas respons banjir dan mengidentifikasi area perbaikan.
 - ✓ Mendokumentasikan pembelajaran dari kejadian banjir untuk meningkatkan rencana kontijensi di masa depan.
2. Revisi Rencana Kontijensi
 - ✓ Memperbarui rencana kontijensi berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak.

Konsep operasi ini dirancang untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuan meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan. Implementasi yang sukses memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak terkait dan masyarakat.

3.2. Fungsi

Dalam pelaksanaan Konsep Operasi (Rencana Tindakan) pada Rencana Kontijensi Bencana Banjir untuk Kabupaten Dharmasraya, setiap pemangku kebijakan memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah fungsi masing-masing pemangku kebijakan:

1. Pemerintah Daerah (Pemda)
 - a. Kebijakan dan Regulasi: Mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesiapsiagaan dan mitigasi bencana banjir.
 - b. Pendanaan: Mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasi penanggulangan dan pemulihan bencana.
 - c. Mobilisasi Sumber Daya: Memastikan tersedianya sumber daya manusia dan logistik untuk operasi darurat.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - a. Koordinasi Utama: Bertindak sebagai koordinator utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan penanggulangan bencana banjir.
 - b. Pengaktifan Pusdalops: Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi untuk memantau situasi dan mengkoordinasikan respon.
 - c. Pelatihan dan Edukasi: Menyediakan pelatihan dan simulasi penanggulangan banjir bagi masyarakat dan instansi terkait.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Infrastruktur dan Drainase: Memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul dan sistem drainase.
 - b. Pemulihan Infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur yang rusak pasca-banjir untuk memulihkan akses dan fungsi normal.
4. Dinas Sosial
 - a. Pengelolaan Pengungsian: Menyediakan dan mengelola tempat pengungsian serta memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.
 - b. Dukungan Sosial: Memberikan bantuan sosial dan dukungan psikososial kepada masyarakat yang terdampak.
5. Dinas Kesehatan
 - a. Pelayanan Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan dan pertolongan pertama bagi korban banjir.
 - b. Pencegahan Penyakit: Mengadakan kampanye kebersihan dan kesehatan untuk mencegah penyakit menular di daerah terdampak.

6. Dinas Perkimtan

Perumahan, Drainase dan jalan lingkungan: memastikan pembangunan dan pemeliharaan perumahan, drainase dan jalan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

7. TNI dan Polri

- a. Pengamanan dan Evakuasi: Membantu dalam evakuasi warga dan pengamanan daerah yang terkena dampak banjir.
- b. Logistik dan Bantuan: Membantu distribusi logistik dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

- a. Informasi Cuaca: Menyediakan prakiraan cuaca dan peringatan dini terkait potensi hujan ekstrem dan banjir.
- b. Komunikasi Publik: Menyebarluaskan informasi cuaca kepada masyarakat dan instansi terkait.

9. Organisasi Non-Pemerintah dan Relawan

- a. Bantuan Tambahan: Menyediakan bantuan tambahan dalam bentuk tenaga sukarela, logistik, dan dukungan teknis.
- b. Edukasi dan Sosialisasi: Membantu dalam edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana.

10. Masyarakat

- a. Kesiapsiagaan Pribadi: Mempersiapkan diri dan keluarga dengan mengikuti arahan dan informasi dari otoritas setempat.
- b. Partisipasi Aktif: Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi penanggulangan banjir, serta memberikan dukungan kepada tetangga dan komunitas.

Dengan peran dan fungsi yang jelas untuk setiap pemangku kebijakan, pelaksanaan rencana kontijensi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, memastikan respons cepat dan pemulihan yang tepat pasca-bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya.

3.3. Tugas-tugas

Pada tahap / fase saat terjadi bencana / tanggap darurat, pada hari “ H “ jam “ J “ Pos komando lapangan Tanggap Darurat /Kecamatan pada tanggap darurat bencana berfungsi :

- a. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan/Kecamatan.
- b. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait;
- c. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadi wilayah kerja Pos Komando Lapangan/Kecamatan .

3.3.1. Uraian Tugas Pos Komando Lapangan/Kecamatan

Uraian tugas Pos Komando Lapangan/Kecamatan pada Tanggap Darurat Bencana adalah:

- a) Melakukan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana oleh Tim Reaksi Cepat;
- b) Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- c) Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
- d) Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan;
- e) Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;
- f) Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

Tabel 3-1 Uraian Fungsi Pos Komando Lapangan/Kecamatan

No	Fungsi	Uraian Fungsi
1	Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi	1. Menentukan tujuan dan strategi penanganan darurat dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak – pihak terkait; 2. Koordinasi dua Tingkat multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana; 3. Manajemen / pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi; 4. Melakukan rapat koordinasi dengan satuan Penanganan Darurat Bencana (PDB) dengan dinas dan unsur pimpinan untuk melaporkan hasil kajian situasi dan memberikan masukan penetapan status tanggap darurat; 5. Mengoperasionalkan Pos Komando Lapangan/Kecamatan dan memberikan perintah/ menugaskan serta memberikan arahan kepada seluruh satuan Komando Lapangan penanganan darurat bencana wilayah Kecamatan; 6. Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat dengan melihat renkon yang sudah disusun dan disesuaikan dengan hasil kaji situasi; 7. Melaporkan dan menyampaikan informasi secara resmi terkait penanganan bencana banjir dan perkembangannya; 8. Menganalisa keadaan atau kemampuan serta sumberdaya dalam PDB (jenis, jumlah, kapasitas) yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat;

No	Fungsi	Uraian Fungsi
		9. Menetapkan prioritas sarana dan prasarana serta pendukung untuk operasi tanggap darurat; 10. Menetapkan dan mengendalikan rencana operasi penanganan darurat bencana banjir; 11. Memastikan adanya akuntabilitas dalam bidang administrasi dan keuangan selama operasi tanggap darurat; 12. Memastikan keamanan dan keselamatan seluruh personil yang bertugas pada operasi tanggap darurat; 13. Melakukan Evaluasi penanganan bencana banjir.
	Komandan (CAMAT)	1. Mengaktifkan dan meningkatkan Pos Pantau kejadian bencana di Kecamatan menjadi Pos Komando keadaan darurat Bencana Kecamatan 2. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. 3. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. 4. Memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis) serta mendukung kelancaran operasi penanganan darurat bencana, tersedia sesuai kebutuhan.
	Wakil Komandan Posko Lapangan (KAPOLSEK)	1. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando keadaan Bencana. 2. Mengkoordinir tugas-tugas urusan keamanan urusan komunikasi & informasi Urusan Kesehatan, urusan personil evakuasi dan SAR, serta elemen-elemen lainnya yang ada dibawah kedudukan Wakil Komandan Posko Lapangan. 3. Mewakili Komandan Posko Lapangan, apabila Komandan Posko Lapangan berhalangan. 4. Wakil Komandan Posko Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

No	Fungsi	Uraian Fungsi
	Wakil Komandan Posko Lapangan (DAN RAMIL)	1. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando keadaan Bencana. 2. Mengkoordinir tugas-tugas urusan personil evakuasi dan sar , urusan tempat evakuasi sementara Urusan logistik & peralatan , Urusan Dapur Umum serta elemen-elemen lainnya yang ada dibawah kedudukan Wakil Komandan Posko Lapangan. 3. Mewakili Komandan Posko Lapangan, apabila Komandan Posko Lapangan berhalangan. 4. Wakil Komandan Posko Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
	Sekretariat	1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dibantu Kepala Sub Bagian terkait 2. Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan . 3. Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi ditunjuk oleh Komandan Posko unsur penyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain. 4. Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapa staff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dengan dukungan terkait administrasi dan keuangan pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan
	TRC Kecamatan, BABINSA & BABINKAMTIBMAS	1. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kecamatan saat kejadian awal yang melakukan assesmen kejadian bencana dan menyampaikan informasi 2. Mendampingi Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, 3. BABINSA & BABINKAMTIBMAS merupakan penghubung antara Nagari terdampak dengan Pos komando lapangan Tanggap Darurat /Kecamatan

3.3.2. Uraian Tugas Pemangku Kebijakan

Berikut adalah tugas masing-masing pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Konsep Operasi (Rencana Tindakan) pada Rencana Kontijensi Bencana Banjir untuk Kabupaten Dharmasraya:

1. Pemerintah Daerah (Pemda)
 - a. Mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait mitigasi dan penanganan bencana banjir.
 - b. Menetapkan status darurat bencana sesuai dengan tingkat keparahan banjir.
 - c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan penanggulangan bencana.
 - d. Menyediakan dan mengelola logistik bantuan untuk daerah terdampak.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan banjir, termasuk penyusunan dan pembaruan rencana kontijensi.
 - b. Memimpin Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) untuk pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan keputusan.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan banjir untuk meningkatkan kesiapan aparat dan masyarakat.
 - d. Menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Merencanakan dan membangun infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, bendungan, dan sistem drainase.
 - b. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur pengendalian banjir dan sistem drainase.
 - c. Memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir untuk memastikan pemulihan akses dan layanan publik.
4. Dinas Sosial
 - a. Menyiapkan dan mengelola lokasi pengungsian dengan menyediakan fasilitas dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tidur.
 - b. Menyalurkan bantuan sosial kepada korban banjir, termasuk kebutuhan dasar dan dukungan psikososial.
5. Dinas Kesehatan
 - a. Menyediakan layanan kesehatan di lokasi pengungsian dan daerah terdampak.
 - b. Melakukan pemantauan kesehatan untuk mencegah dan menangani penyakit menular.
 - c. Melakukan kampanye kebersihan dan kesehatan di daerah terdampak banjir.
6. Dinas Perkimtan
 - a. Merencanakan dan membangun perumahan terdampak banjir.
 - b. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan lingkungan pemukiman dan sistem drainase.

7. TNI dan Polri
 - a. Melakukan operasi evakuasi dan penyelamatan korban banjir di daerah berisiko tinggi.
 - b. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban di daerah terdampak.
 - c. Membantu distribusi logistik dan bantuan ke lokasi pengungsian dan masyarakat terdampak.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
 - a. Menyediakan prakiraan cuaca dan peringatan dini mengenai potensi hujan ekstrem dan banjir.
 - b. Menyampaikan informasi cuaca secara berkala kepada BPBD dan masyarakat.
9. Organisasi Non-Pemerintah dan Relawan
 - a. Menyediakan bantuan tambahan berupa tenaga sukarela, logistik, dan dukungan teknis untuk operasi penanggulangan banjir.
 - b. Membantu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan banjir kepada masyarakat.
10. Masyarakat
 - a. Menyiapkan rencana evakuasi dan kebutuhan darurat untuk diri sendiri dan keluarga.
 - b. Mematuhi arahan dan instruksi dari otoritas terkait selama masa bencana.
 - c. Terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan respon komunitas, seperti simulasi dan pelatihan.

Dengan pembagian tugas yang jelas ini, setiap pemangku kebijakan dapat bekerja secara sinergis untuk menghadapi dan mengatasi dampak banjir di Kabupaten Dharmasraya dengan lebih efektif.

3.4. Pelaksanaan Tugas

Untuk mencapai seluruh sasaran tindakan, organisasi menurunkan setiap tindakan dalam bentuk tugas-tugas yang harus dijalankan setiap bidang fungsi bersama Pos komando lapangan Tanggap Darurat /Kecamatan sehingga perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka tugas-tugas harus disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana (yang) berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

Tabel 3-2 Uraian Tugas Tim Poko Lapangan

No	Fokus Tugas	Target
1	Urusan Keamanan : a. Koordinator : Kasi Trantib pada Kantor Kecamatan b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Unsur BPBD - Satuan Polisi PP	1. Mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya 2. Melakukan Tugas dan bertanggungjawab untuk menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta Keamanan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan Kecamatan

	- Tokoh Masyarakat dan Pemuda - Unsur Relawan	
2	Urusan Logistik dan Peralatan : a. Koordinator : Kasi Linmas pada Kantor Kecamatan b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Unsur BPBD - Tokoh Masyarakat dan Pemuda - TAGANA / Unsur Relawan	1. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. 2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan. 3. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum. 4. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait. 5. Kepala Urusan Logistik dan Peralatan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan Kecamatan
	Urusan Layanan Kesehatan: a. Koordinator : Kepala Puskesmas b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Staf Puskesmas - Bidan Desa - Unsur BPBD - Tagana / Unsur Relawan	1. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan kesehatan. 2. Melaksanakan perawatan dan pengobatan terhadap korban bencana 3. Melakukan rujukan bagi korban bencana yang perlu dirujuk ke Rumah Sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap 4. Mengkoordinasikan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di wilayah terpapar bencana 5. Menjamin kesehatan seluruh personil Komando Posko Lapangan dalam menjalankan tugasnya 6. Kepala Urusan Layanan Kesehatan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
4	Urusan Urusan Personil, Evakuasi dan SAR: a. Koordinator : Wakapolsek b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Unsur BPBD - Satuan Polisi PP - Tokoh Masyarakat dan Pemuda - TAGANA/Unsur Relawan	1. Mengkoordinir relawan dan personil lainnya terkait penugasan darurat bencana 2. Melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat korban bencana menuju Tempat Evakuasi Sementara 3. Melaksanakan dan mengkoordinasi pencarian dan penyelamatan korban bencana Kepala Urusan Personil, 4. Evakuasi dan SAR bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
5	Urusan Tempat Evakuasi Sementara: a. Koordinator : Wa Dan Ramil b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Unsur BPBD - Satuan Polisi PP	1. Memperispkan lokasi agar siap digunakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara 2. Menentukan titik lokasi yang akan digunakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara 3. Membenahi lokasi dan menyiapkan tempat evakuasi 4. Kepala Urusan Tempat Evakuasi Sementara bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

	- Tokoh Masyarakat dan Pemuda - TAGANA/Unsur Relawan	
6	Urusan Komunikasi dan Informasi: a. Koordinator : RAPI b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - Unsur BPBD - Anggota RAPI - Opreator Nagari - Tokoh Masyarakat dan Pemuda - TAGANA / Unsur Relawan	1. Menyiapkan dan menyeting peralatan komunikasi agar bisa dioperasikan 2. Melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi dalam operasi tanggap darurat bencana 3. Menjadi alternatif alat komunikasi yang mampu membantu fungsi komunikasi jika alat komunikasi yang lain mengalami gangguan dan tidak sehingga bisa dioperasikan. 4. Kepala Urusan Komunikasi dan Informasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
7	Urusan Dapur Umum: a. Koordinator : Kasi Kesra b. Anggota : - Unsur Polsek - Unsur Koramil - PKK - Unsur BPBD - Tokoh Masyarakat dan Pemuda - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) - TAGANA / Unsur Relawan	1. Menyiapkan peralatan dan bahan-bahan agar siap diolah menjadi makanan yang dibutuhkan dalam darurat bencana 2. Mengolah bahan makanan sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualitasnya. 3. Kepala Urusan Dapur Umum bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

3.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi dalam Rencana Kontijensi Bencana Banjir untuk Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk memastikan adanya kerjasama yang efektif antara semua pihak terkait dalam penanganan bencana. Berikut adalah instruksi koordinasi yang dapat diterapkan:

Instruksi Koordinasi Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya Memuat arahan atau mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komando kepada seluruh fungsi/sub-bidang dalam organisasi dengan tahapan :

1. Penghimpunan Informasi Dampak Bencana Banjir

BPBD Dharmasraya menghimpun informasi data terdampak banjir berupa data primer dan data sekunder meliputi:

- ✓ Dimana : Tempat/lokasi bencana meliputi waktu dan tanggal
- ✓ Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- ✓ Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- ✓ Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

2. Pembentukan Tim Koordinasi
 - a. Ketua Tim Koordinasi: Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Bencana Banjir.
 - b. Anggota Tim: Perwakilan dari Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, BMKG, dan organisasi non-pemerintah.
3. Penugasan Pos Pendamping PDB di setiap kecamatan

Berlaku selama 7 hari sejak operasi penanganan darurat bencana banjir. Penugasan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi di lapangan.
4. Menetapkan Status Tanggap Darurat apabila bencana banjir memiliki dampak yang besar dan banyak nagari dengan dampak luas
5. Penyusunan rencana operasi penanganan kedaruratan
6. Rapat Koordinasi Berkala
 - a. Rapat Pra-Bencana:
 - ✓ Mengadakan rapat koordinasi minimal sebulan sekali untuk membahas persiapan dan kesiapsiagaan menghadapi banjir.
 - ✓ Mengevaluasi kesiapan logistik, personel, dan infrastruktur pendukung.
 - b. Rapat Tanggap Darurat:
 - ✓ Mengadakan rapat segera setelah peringatan dini banjir untuk mengkoordinasikan respons cepat dan penugasan tugas.
 - c. Rapat Pasca-Bencana:
 - ✓ Mengadakan rapat evaluasi setelah kejadian banjir untuk menilai efektivitas respons dan mengidentifikasi perbaikan.
7. Komunikasi dan Informasi
 - a. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops):
 - ✓ BPBD sebagai pengelola Pusdalops, berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi selama masa bencana.
 - ✓ Menyediakan update informasi berkala kepada semua pemangku kepentingan terkait situasi terkini, status evakuasi, dan kebutuhan darurat.
 - b. Saluran Komunikasi:
 - ✓ Menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti radio, telepon, pesan teks, dan media sosial untuk mengkoordinasikan kegiatan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
8. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
 - a. Pemerintah Daerah:
 - ✓ Menyediakan dukungan logistik dan administrasi untuk operasional penanggulangan bencana.

- ✓ Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan.
- b. BPBD:
 - ✓ Mengkoordinasikan aktivasi sistem peringatan dini dan mengarahkan pelaksanaan evakuasi.
 - ✓ Mengatur distribusi bantuan dan logistik ke daerah terdampak.
- c. Dinas Pekerjaan Umum:
 - ✓ Mengelola penutupan dan pembukaan akses jalan sesuai kebutuhan dan mengkoordinasikan perbaikan infrastruktur.
- d. Dinas Sosial:
 - ✓ Mengatur dan memantau pengelolaan tempat pengungsian dan distribusi bantuan sosial.
- e. Dinas Kesehatan:
 - ✓ Memastikan layanan kesehatan tersedia di lokasi pengungsian dan memantau kondisi kesehatan masyarakat.
- f. TNI dan Polri:
 - ✓ Membantu evakuasi, pengamanan, dan distribusi bantuan serta menjaga ketertiban di lokasi pengungsian.
- g. BMKG:
 - ✓ Memberikan informasi dan peringatan dini terkait prakiraan cuaca dan potensi banjir.
- h. Organisasi Non-Pemerintah dan Relawan:
 - ✓ Mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, terutama dalam distribusi bantuan dan layanan pendampingan.
- 9. Evaluasi dan Pembelajaran
 - a. Dokumentasi dan Pelaporan:
 - ✓ Setiap pihak wajib mendokumentasikan kegiatan dan mengumpulkan data untuk evaluasi pasca-bencana.
 - b. Review dan Pembaruan Rencana:
 - ✓ Melakukan peninjauan dan pembaruan rencana kontijensi berdasarkan temuan evaluasi dan pembelajaran dari kejadian banjir.
 - ✓ Dengan instruksi koordinasi yang jelas, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam menghadapi dan mengatasi dampak banjir di Kabupaten Dharmasraya.

BAB 4. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

4.1. Administrasi

Bagian ini mencakup aspek-aspek administratif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana kontingensi banjir. Sub-bagian ini meliputi:

4.1.1. Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab:

Struktur Organisasi Penanganan Banjir

1) Pemerintah Daerah

- a. Bupati bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan kebijakan umum dalam penanganan banjir.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan bencana, termasuk persiapan, respons, dan pemulihan.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab atas infrastruktur, seperti pembangunan dan pemeliharaan tanggul, drainase, dan jalan.
- d. Dinas Sosial P3APKB mengelola bantuan sosial dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
- e. Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan darurat dan memastikan sanitasi serta kesehatan masyarakat selama dan setelah banjir.
- f. Dinas Perkimtan bertanggungjawab atas perumahan, system drainase dan jalan lingkungan pemukiman.

2) Dinas Terkait

- a. Dinas Lingkungan Hidup memantau dampak lingkungan dan melakukan tindakan mitigasi untuk mengurangi risiko banjir.
- b. Dinas Pendidikan mengatur penggunaan sekolah sebagai tempat evakuasi dan memastikan kelanjutan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak.
- c. Dinas Pertanian menyediakan bantuan dan dukungan bagi petani yang lahannya terdampak banjir.

3) Lembaga Non-Pemerintah

- a. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memberikan bantuan teknis, logistik, dan sumber daya tambahan. Mereka juga sering terlibat dalam program pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana.
- b. Palang Merah Indonesia (PMI) Menyediakan bantuan medis, evakuasi, dan distribusi bantuan kemanusiaan.
- c. Organisasi Kemasyarakatan, NGO dan lainnya yang memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dana, teknis, dan logistik.

4) Komunitas Lokal

- a. Kelompok Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan, memberikan informasi awal, membantu dalam evakuasi, dan distribusi bantuan.
- b. Relawan atau anggota masyarakat yang secara sukarela membantu dalam berbagai kegiatan penanganan banjir, mulai dari evakuasi hingga distribusi bantuan.
- c. Tokoh Masyarakat dan Agama berperan dalam memberikan dukungan moral dan psikologis kepada masyarakat terdampak serta membantu dalam penyebaran informasi.

4.1.2. Tujuan Struktur Organisasi

Struktur ini dirancang untuk memastikan:

- ✓ Semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik, berbagi informasi, dan mengkoordinasikan tindakan mereka untuk respons yang lebih cepat dan efisien.
- ✓ Respons Cepat dengan pembagian tugas yang jelas, setiap pihak tahu peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bertindak cepat dalam situasi darurat.
- ✓ Sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat terdampak.

4.2. Prosedur Operasional Standar (SOP):

- ✓ Rincian SOP yang harus diikuti selama situasi darurat banjir.
- ✓ Prosedur komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

Prosedur Operasional Standar (SOP) Penanganan Banjir

1) Deteksi Dini

- a. Pemantauan Cuaca:
- b. Menggunakan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca dan potensi hujan lebat.
- c. Memanfaatkan teknologi seperti radar cuaca dan satelit untuk deteksi dini potensi banjir.
- d. Sistem Peringatan Dini:
- e. Mengaktifkan sistem peringatan dini yang menginformasikan masyarakat tentang potensi banjir melalui berbagai media, termasuk sirene, SMS, dan media sosial.
- f. Koordinasi dengan posko-posko pemantauan di daerah rawan banjir untuk mendapatkan informasi terkini.

2) Evakuasi

- a. Rencana Evakuasi:
- b. Menyusun rencana evakuasi yang jelas, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat penampungan sementara.
- c. Melibatkan komunitas lokal dalam penyusunan rencana evakuasi untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan kondisi lapangan.
- d. Pelaksanaan Evakuasi:
- e. Mengaktifkan tim evakuasi segera setelah peringatan dini dikeluarkan.
- f. Menggunakan kendaraan evakuasi dan peralatan penyelamatan untuk membantu masyarakat yang terjebak.
- g. Memprioritaskan evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

3) Penanganan Darurat

- a. Pendirian Posko Darurat:
- b. Mendirikan posko darurat di lokasi strategis untuk koordinasi penanganan banjir.
- c. Posko ini dilengkapi dengan peralatan komunikasi, logistik, dan medis.
- d. Distribusi Bantuan:
- e. Mengatur distribusi bantuan seperti makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan kepada masyarakat terdampak.
- f. Memastikan bantuan didistribusikan secara merata dan tepat sasaran.
- g. Layanan Kesehatan:
- h. Menyediakan layanan kesehatan darurat di posko-posko kesehatan.
- i. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan perawatan medis kepada korban banjir.

4) Pemulihan Pasca Banjir

- a. Pembersihan dan Rehabilitasi:
- b. Melakukan pembersihan area terdampak banjir, termasuk jalan, rumah, dan fasilitas umum.
- c. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak seperti jembatan, jalan, dan sistem drainase.
- d. Dukungan Psikososial:
- e. Memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat terdampak untuk membantu mereka pulih dari trauma.
- f. Melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam program pemulihan.

5) Evaluasi dan Pelaporan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP selama penanganan banjir untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

- b. Menyusun laporan lengkap yang mencakup semua kegiatan dan hasil penanganan banjir untuk digunakan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.
- c. Sistem dokumentasi untuk mencatat semua kegiatan dan keputusan yang diambil selama penanganan banjir.

SOP ini dirancang untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka serta tindakan yang harus diambil pada setiap tahap penanganan banjir. Dengan demikian, respons terhadap situasi darurat banjir dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

4.3. Logistik

Bagian ini mencakup perencanaan dan pengelolaan logistik yang diperlukan untuk mendukung operasi penanganan banjir. Sub-bagian ini meliputi:

- 1) Inventarisasi Sumber Daya:
 - a. Daftar lengkap sumber daya yang tersedia, termasuk peralatan, kendaraan, dan bahan bantuan.
 - b. Lokasi penyimpanan dan kondisi sumber daya tersebut.
- 2) Distribusi dan Pengelolaan Bantuan:
 - a. Rencana distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
 - b. Mekanisme pengelolaan dan pengawasan distribusi bantuan untuk memastikan tepat sasaran.
- 3) Rantai Pasokan dan Logistik:
 - a. Identifikasi jalur distribusi dan titik-titik kritis dalam rantai pasokan.
 - b. Strategi untuk mengatasi hambatan logistik selama situasi darurat.
- 4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga:
 - a. Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk mendukung operasi logistik.
 - b. Perjanjian kerjasama dan koordinasi dengan pihak ketiga.
- 5) Pemulihan dan Rehabilitasi:
 - a. Rencana pemulihan logistik pasca banjir.
 - b. Evaluasi dan perbaikan sistem logistik berdasarkan pengalaman dari kejadian banjir sebelumnya.

Pengeralahan sumberdaya dalam menghadapi bencana Banjir sebagai berikut:

1. Pada awal kejadian bencana banjir system komando penanganan darurat bencana diaktifkan seluruh sumberdaya baik berupa personil, logistic dan peralatan dioptimalkan;
2. Pemerintah Kecamatan mengajukan permohonan bantuan personil, logistik, dan peralatan ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dimana biaya operasional ditanggung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

3. BPBD Kabupaten Dharmasraya mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana;
4. Apabila Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki ketersediaan sumberdaya, maka dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Pusat (BNPB);
5. Pelaksanaan pengerahan sumberdaya berasal dari asal hingga lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya;
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistic, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan;
7. Pola pendampingan BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga penangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

BAB 5. KOMANDO, KENDALI DAN KOMUNIKASI

5.1. Koordinasi dan Komando

5.1.1. Struktur Organisasi

1. Komando Tanggap Darurat

- Ketua: Bupati
- Anggota:
 - Perwakilan TNI
 - Perwakilan Polri
 - Sekretaris Daerah
 - Asiten
 - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - Kepala Dinas Kesehatan
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - Perwakilan lembaga terkait lainnya (PMI, Basarnas)

2. Tim Operasional

- Koordinator: Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya
- Anggota:
 - Tim Evakuasi bertanggung jawab atas evakuasi warga dari daerah terdampak
 - Tim Penyelamatan melakukan penyelamatan korban bencana
 - Tim Distribusi Bantuan mengelola dan mendistribusikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar.

3. Unit Pendukung

- Koordinator: Kepala Dinas Sosial
- Anggota:
 - Unit Logistik menyediakan dan mengelola logistik yang dibutuhkan
 - Unit Komunikasi mengatur komunikasi antara tim dan masyarakat
 - Unit Medis menyediakan dukungan medis dan layanan kesehatan

5.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

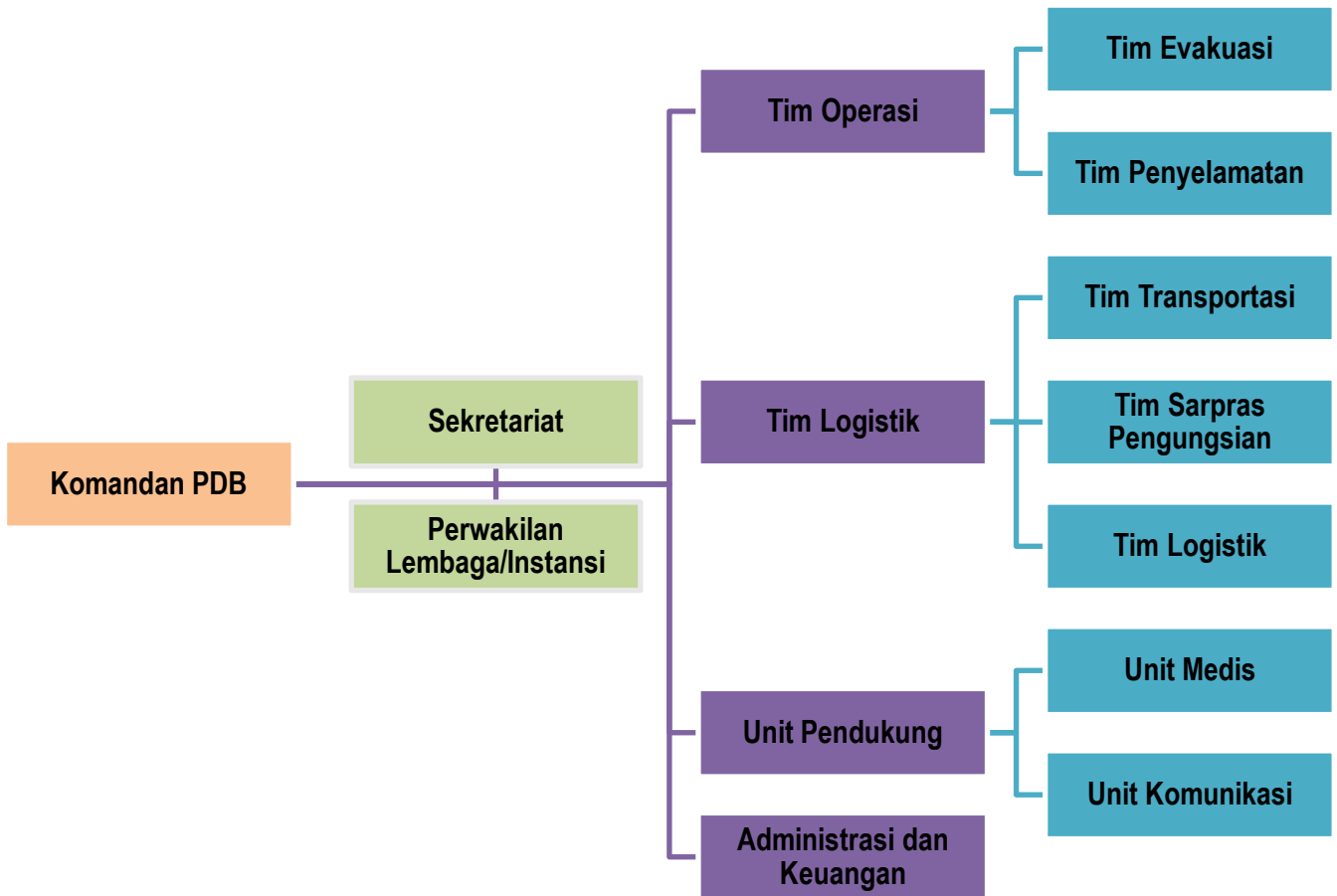
- ✓ Komandan Tanggap Darurat bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi dan komando selama penanggulangan bencana banjir.
- ✓ Koordinator Lapangan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional di lapangan, termasuk evakuasi dan penyelamatan.
- ✓ Tim Logistik bertanggung jawab atas penyediaan dan distribusi logistik yang diperlukan selama penanggulangan bencana.
- ✓ Tim Medis bertanggung jawab atas penyediaan layanan medis dan pertolongan pertama bagi korban banjir.
- ✓ Tim Komunikasi bertanggung jawab atas penyebaran informasi dan koordinasi komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat.

5.1.3. Mekanisme Koordinasi

- ✓ Mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk memastikan semua pihak yang terlibat memiliki informasi terbaru dan dapat bekerja secara sinergis.
- ✓ Mendirikan pusat komando di lokasi strategis untuk memantau situasi dan mengkoordinasikan respons penanggulangan bencana.
- ✓ Mengembangkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk melacak perkembangan situasi, kebutuhan logistik, dan status evakuasi.
- ✓ Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti BNPB, BMKG, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan respons yang terpadu dan efektif.

5.2. Struktur Organisasi Komando

Gambar 5-1 Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana (TDB)



5.3. Kendali

Kendali utama operasi penanganan darurat bencana banjir Kabupaten Dharmasraya berada pada Komandan PDB. Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistic dan operasi penangaann darurat bencana.

5.4. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten serta Perangkat Daerah Vertikal baik Provinsi maupun pusat yang dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

5.5. Komunikasi

1. Radio

✓ Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan Penggunaan frekuensi yang diperuntukan untuk BPBD.

✓ Frekuensi Radio VHF

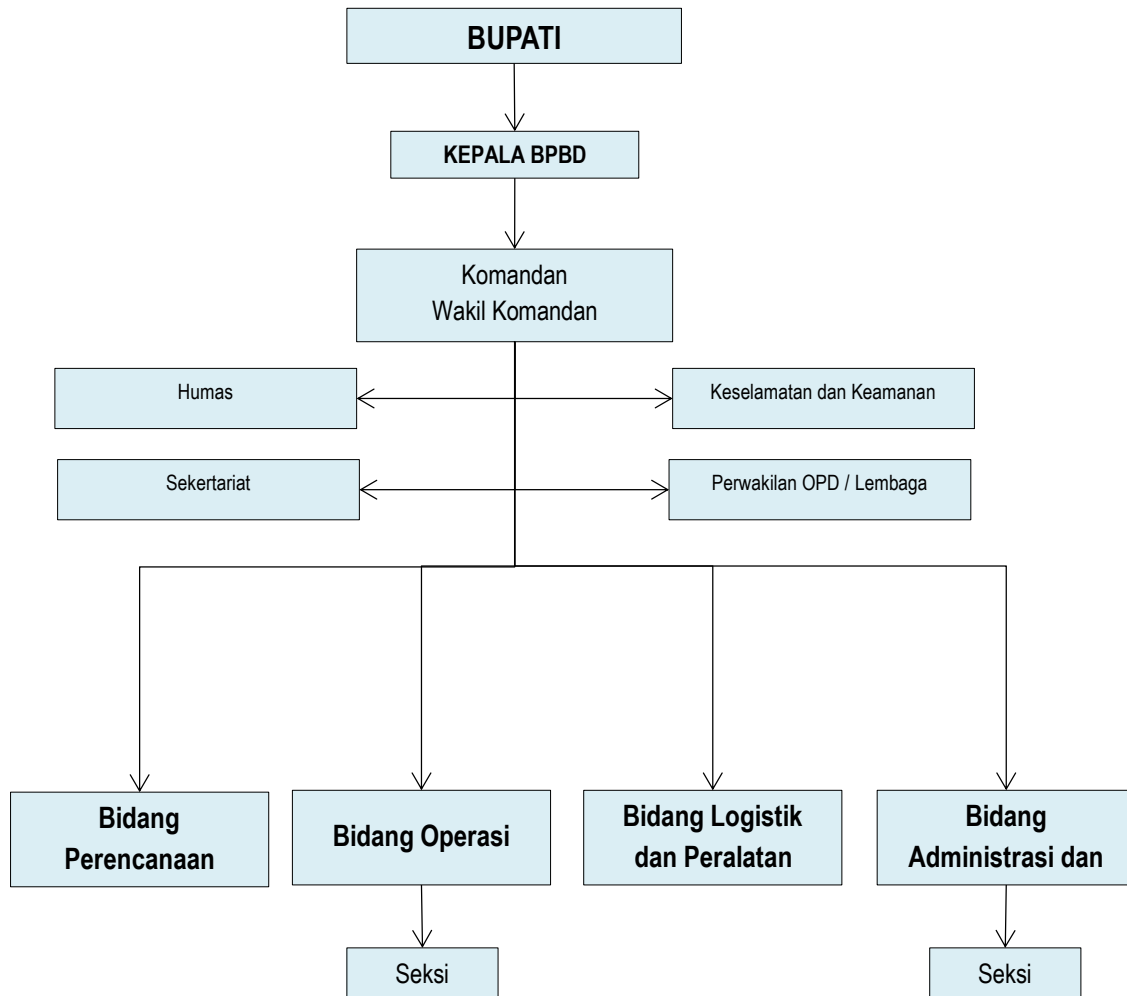
Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

2. Email : bpbd_dharmasraya@dharmasrayakab.go.id

5.6. Informasi

Informasi di peroleh dari berbagai sumber seperti laporan dari relawan, aparat nagari, kecamatan, serta melalui laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan Operasi yang terlibat dalam Struktur Komando. Pengelolaan informasi dilakukan secara menyeluruh meliputi pengolahan data dan validasi informasi, serta system aplikasi yang digunakan.

LAMPIRAN - A: STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR



Sumber : Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

LAMPIRAN - B: SUSUNAN TUGAS

SUSUNAN TUGAS

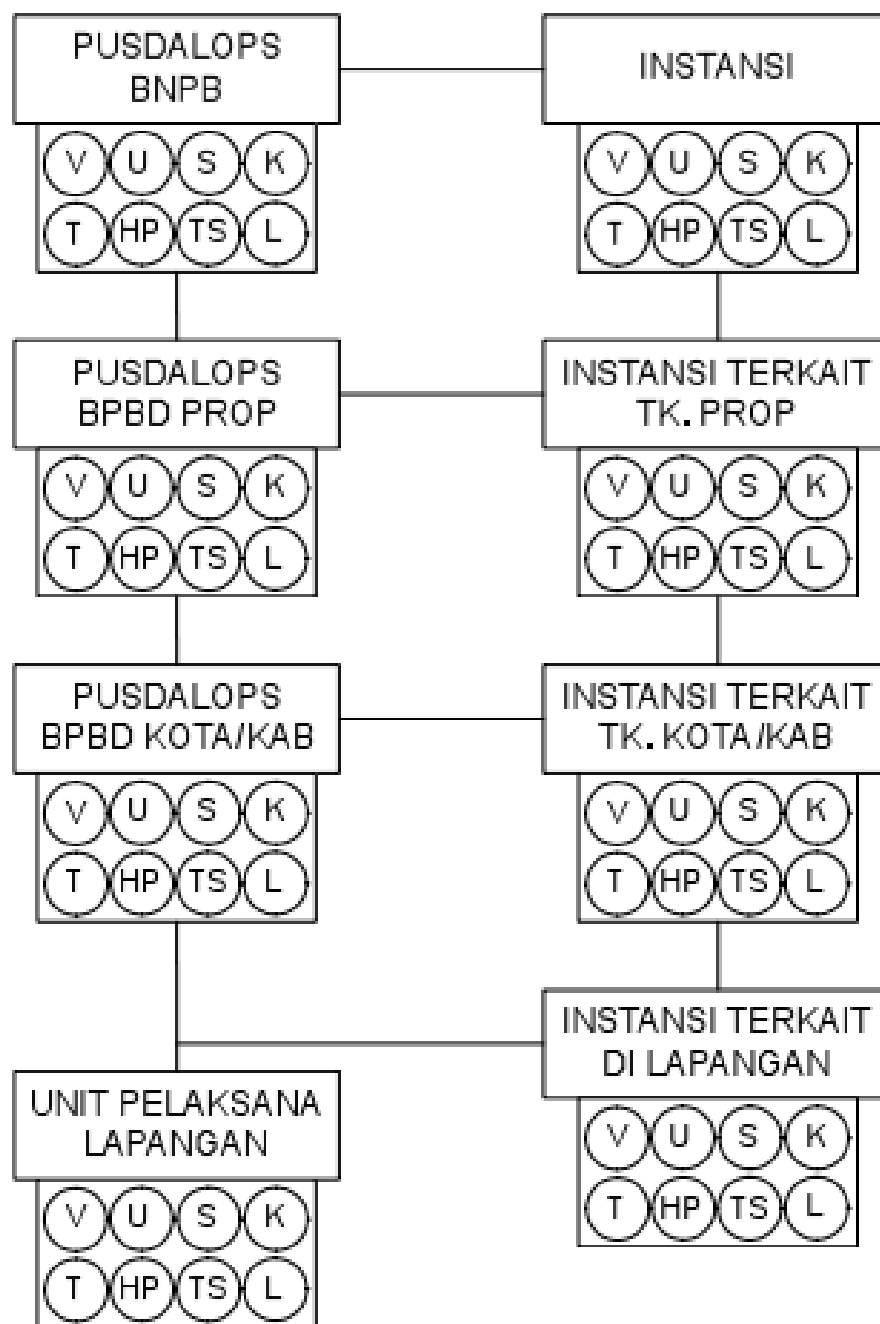
Unit-unit dibawah ini menjalankan tugas-tugasnya dibawah kesatuan komando, kendali dan koordinasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

No	Fungsi	Uraian Fungsi
1	Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi	1. Menentukan tujuan dan strategi penanganan darurat dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak – pihak terkait; 4. Koordinasi dua Tingkat multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana; 5. Manajemen / pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi; 6. Melakukan rapat koordinasi dengan satuan Penanganan Darurat Bencana (PDB) dengan dinas dan unsur pimpinan untuk melaporkan hasil kajian situasi dan memberikan masukan penetapan status tanggap darurat; 7. Mengoperasionalkan Pos Komando Lapangan/ Kecamatan dan memberikan perintah/ menugaskan serta memberikan arahan kepada seluruh satuan Komando Lapangan penanganan darurat bencana wilayah Kecamatan; 8. Menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat dengan melihat renkon yang sudah disusun dan disesuaikan dengan hasil kaji situasi; 9. Melaporkan dan menyampaikan informasi secara resmi terkait penanganan bencana banjir dan perkembangannya; 10. Menganalisa keadaan atau kemampuan serta sumberdaya dalam PDB (jenis, jumlah, kapasitas) yang diperlukan untuk operasi tanggap darurat; 11. Menetapkan prioritas sarana dan prasarana serta pendukung untuk operasi tanggap darurat; 12. Menetapkan dan mengendalikan rencana operasi penanganan darurat bencana banjir; 13. Memastikan adanya akuntabilitas dalam bidang administrasi dan keuangan selama operasi tanggap darurat; 14. Memastikan keamanan dan keselamatan seluruh personil yang bertugas pada operasi tanggap darurat; 15. Melakukan Evaluasi penanganan bencana banjir.
	Komandan (CAMAT)	Mengaktifkan dan meningkatkan Pos Pantau kejadian bencana di Kecamatan menjadi Pos Komando keadaan darurat Bencana Kecamatan

No	Fungsi	Uraian Fungsi
		1. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana. 2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana. 3. Memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis) serta mendukung kelancaran operasi penanganan darurat bencana, tersedia sesuai kebutuhan.
	Wakil Komandan Posko Lapangan (KAPOLSEK)	1. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando keadaan Bencana. 2. Mengkoordinir tugas-tugas urusan keamanan urusan komunikasi & informasi Urusan Kesehatan, urusan personil evakuasi dan SAR, serta elemen-elemen lainnya yang ada dibawah kedudukan Wakil Komandan Posko Lapangan. 3. Mewakili Komandan Posko Lapangan, apabila Komandan Posko Lapangan berhalangan. 4. Wakil Komandan Posko Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
	Wakil Komandan Posko Lapangan (DAN RAMIL)	1. Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando keadaan Bencana. 2. Mengkoordinir tugas-tugas urusan personil evakuasi dan sar , urusan tempat evakuasi sementara Urusan logistik & peralatan , Urusan Dapur Umum serta elemen-elemen lainnya yang ada dibawah kedudukan Wakil Komandan Posko Lapangan. 3. Mewakili Komandan Posko Lapangan, apabila Komandan Posko Lapangan berhalangan. 4. Wakil Komandan Posko Lapangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.
	Sekretariat	1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dibantu Kepala Sub Bagian terkait 2. Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan . 3. Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi ditunjuk oleh Komandan Posko unsur

No	Fungsi	Uraian Fungsi
		penyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain. 4. Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapa staff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dengan dukungan terkait administrasi dan keuangan pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan
	TRC Kecamatan, BABINSA & BABINKAMTIBMAS	1. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kecamatan saat kejadian awal yang melakukan assesmen kejadian bencana dan menyampaikan informasi 2. Mendampingi Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, 3. BABINSA & BABINKAMTIBMAS merupakan penghubung antara Nagari terdampak dengan Pos komando lapangan Tanggap Darurat /Kecamatan

LAMPIRAN - C: JARING KOMUNIKASI



Keterangan :

(V) : RADIO HT VHF	(T) : TELEPON PT TELKOM
(U) : RADIO HT UHF	(HP) : HANDPHONE
(S) : RADIO SSB	(TS) : TELEPON SATELIT
(K) : KOMPUTER	(L) : SARANA LAIN

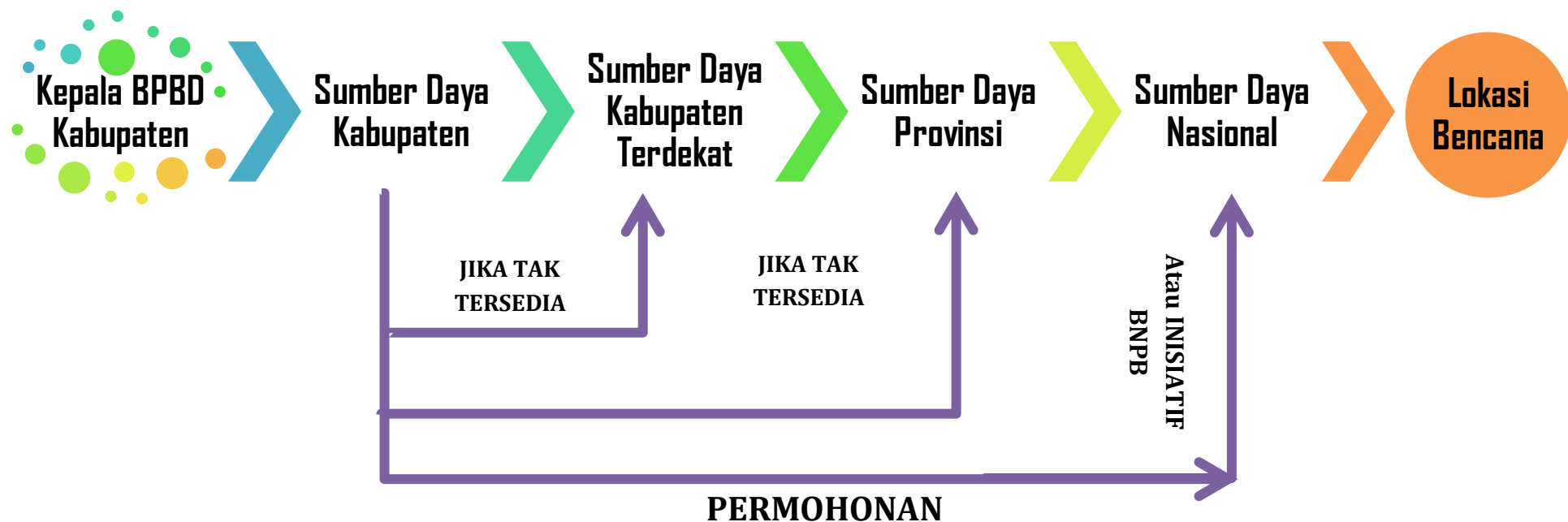
Sumber : Peraturan Ka BNPB No. 10 Tahun 2008

LAMPIRAN - D: ESTIMASI KETERSEDIAAN & KEBUTUHAN SUMBERDAYA

No	Tugas/Sumberdaya Manusia/Sarana/Prasarana/Bahan	Estimasi Ketersediaan	Estimasi Kebutuhan
	Kajian Situasi		
	Sumberdaya Manusia	- BPBD Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah xx orang dengan kemampuan xxx - KOREM 030/SSD: dengan jumlah personil xx yang memiliki kemampuan melakukan monitoring situasi dan kaji cepat yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan informasi yang valid, mampu menggunakan peralatan komunikasi, GPS, GIS. - Polres Dharmasraya dengan jumlah xx orang dengan kemampuan xxx - TAGANA Dharmasraya dengan jumlah xx orang dengan kemampuan xxx	
	Sarana / Prasarana / Bahan		

No	SPESIFIKASI BARANG		TAHUN PEMBELIAN	UKURAN BARANG/ KONTRUKSI (P, S, D)	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH BARANG
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE				
1	4	5	9	10	11	12
1	Water Treatment (Mesin Proses)	Portable	2011		Baik	1
2	Portable Compressor	fetct	2013		Baik	3
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota Rush	2008	1495 CC	Baik	1
4	Pick Up	Mithsubishi / Triton docab 4x4	2011	2500	Baik	1
5	Pick Up	Mitsubishi / Pick Up L 300	2017		Baik	1
6	Sepeda Motor	Kawasaki / Edge	2011	110	Kurang Baik	2
7	Sepeda Motor	Kawasaki / GLX / Trail	2011	150	Kurang Baik	1
8	Sepeda Motor	Kawasaki / GLX / Trail	2016	150	Baik	2
9	Sepeda Motor	YAMAHA / FREEGON. S	2022	125 cc	Baik	1
10	Motor Boat	Suzuki	2009	30 PK	Kurang Baik	1
11	Motor Boat	Suzuki	2010	30 PK	Kurang Baik	1
12	Motor Boat	Tohatshu / Mesin Tempel	2011	25PK	Kurang Baik	1
13	Motor Boat	Yamaha / 4 Tak	2015	25 PK	Baik	2

No	SPESIFIKASI BARANG		TAHUN PEMBELIAN	UKURAN BARANG/ KONTRUKSI (P, S, D)	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)	JUMLAH BARANG
	NAMA / JENIS BARANG	MERK / TYPE				
1	4	5	9	10	11	12
14	Motor Boat	Tohatsu / Mesin Perahu 18 PK	2022		Baik	2
15	Perahu Penumpang	Basemarine / Perahu Karet	2015	8 Penumpang	Kurang Baik	1
16	Perahu Penumpang	Perahu Evakuasi / Perahu Fiber	2016		Baik	2
17	Perahu Penumpang	Boogie	2023		Baik	1
18	Perahu Penyeberangan	Perahu Katamaran	2024	3,2 m	Baik	2
19	Mobil Tangki Air	Isuzu / NKR71HDE2- 2	2011	4570	Kurang Baik	1
20	Mesin Gergaji	Sinsaw	2018		Baik	1
21	Mesin Gergaji	TANIKA / CHAINSAW	2022	58 cc	Baik	1
22	Mesin Gergaji	Mesin Gergaji Kecil	2022	58 cc	Baik	2
23	Global Positioning System	OREGON 750 / GPS	2019		Baik	1
24	Rak Besi	-	2019		Baik	5
25	Rak Besi	-	2021		Baik	2
26	Handy Cam	-	2015		Baik	1
27	Professional Sound System	Polytron / paspro	2023		Baik	1
28	Camera Electronic	Sony	2011		Kurang Baik	1
29	Layar Film/Projector	INFOCUS 112X / PROYEKTOR	2019		Baik	1
30	Genset	-	2011		Kurang Baik	2
31	Set Dapur Lapangan	trailer dapur / dapur lapangan	2022		Baik	1
32	Tenda	Tenda Pleton	2011		Kurang Baik	1
33	Tenda	Tenda Regu	2011		Kurang Baik	2
34	Tenda	Tenda Keluarga	2011		Kurang Baik	1
35	Tenda		2014		Baik	5
36	Tenda	Tenda Pengungsi	2024	6 x 12 m	Baik	2



1. Biaya Pengerahan dan mobilisasi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/kota terkena bencana
2. Penerimaan dan penggunaan sumber daya dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota terkena bencana
3. Dalam hal keterbatasan sumber daya yang dikerahkan oleh BPBD, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan baik atas permintaan BPBD maupun atas inisiatif BNPB

Sumber : Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

LAMPIRAN - E: PETA

Peta Tingkat Ancaman/Bahaya Bencana Banjir

Peta Tingkat Kerentanan Bencana Banjir

Peta Tingkat Kapasitas Bencana Banjir

KONSEP RENCANA OPERASI

A. Konsep Umum Operasi :

Operasi dilaksanakan secara simultan dan parsial sesuai besaran ancaman dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

B. Posko Keadaan Darurat Kabupaten Dharmasraya:

- Menentukan status keadaan darurat bencana berdasarkan informasi BMKG, dan memberlakukan Rencana Operasi menjadi Perintah Operasi
- Mengkomando, mengendalikan, dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Hydrometeorologi Kabupaten Dharmasraya.
- Membantu Operasi Penanggulangan Bencana di Kecamatan yang terdampak.

C. Pos komando lapangan Tanggap Darurat /Kecamatan

Camat sebagai komandan Pos komando lapangan Tanggap Darurat Kecamatan mengaktivasi Pos komando lapangan Tanggap Darurat Kecamatan mengerahkan dan mengendalikan perencanaan dan operasi dilapangan (nyata) sesuai tugas-tugas yang telah disusun sebagai strategi penanganan kedaruratan bencana (yang) berdasarkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

D. Instruksi Koordinasi

1. Susunan tugas berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Pada saat Kabupaten Dharmasraya mengaktivasi sistem komando tanggap darurat, Camat juga mengaktifasi sistem komando tanggap darurat lapangan Kecamatan
3. Renkon diaktivasi menjadi Rencana Operasi (RO) dengan memperhatikan kaji cepat di lapangan
4. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai penanggungjawab utama memberikan dukungan fungsi taktis, sedangkan pemerintah provinsi dan pusat memberikan bantuan dan dukungan yang tidak bisa terpenuhi oleh pemerintah kabupaten
5. Sistem komando penanganan darurat Kecamatan diaktifkan pada hari “ H “ jam “ J “ dengan menunjuk komandan penanganan darurat bencana yaitu CAMAT daerah terdampak.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk memobilisasi seluruh sumberdaya untuk penanggulangan banjir di wilayah Kecamatan terdampak
7. Tim Kaji Cepat/TRC Kecamatan segera melaporkan kondisi terkini kepada komandan tanggap darurat lapangan Kecamatan. Sebagai kajian untuk dilakukan langkah-langkah berikutnya
8. Dalam melaksanakan operasi harus memastikan keterpaduan upaya pada saat operasi

9. Perhatikan faktor keamanan personil dan keamanan peralatan untuk meminimalisir kerugian
10. Memperhatikan nilai-nilai dan budaya local daerah terdampak
11. Melaporkan setiap perkembangan situasi pada kesempatan pertama

E. Administrasi Dan Logistik

a) Administrasi

1. Pada awal kejadian banjir atau sebelum sistem komando Tanggap Darurat Lapangan Kecamatan diaktifkan maka seluruh sumberdaya lokal wilayah Kecamatan dioptimalkan dimana dana kegiatan berasal dari OPD Teknis dan instansi terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana (BPBD, DPUPR, Dinsos, Dinkes, BKD, Dinas Perkimtan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari) serta Lembaga usaha lainnya.
2. Mengumpulkan Data dan Informasi tentang Bencana yang terjadi
3. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik
4. Menangkal hoax yang muncul

b) Logistik

Pada awal kejadian sebelum sistem komando diaktifkan maka seluruh sumberdaya lokal baik berupa personil, logistik dan peralatan dari seluruh organisasi perangkat daerah, Lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dioptimalkan.

Kecamatan dapat meminta bantuan personil, logistik dan peralatan ke Kecamatan terdekat dimana biaya operasional ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Sumber daya sebagaimana dalam lampiran sumberdaya Kecamatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA BANJIR

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penanganan bencana banjir guna meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh petugas dan pihak terkait dalam penanganan bencana banjir, termasuk tim penanggulangan bencana, pemerintah daerah, dan masyarakat.

3. Definisi

- **Bencana Banjir:** Kejadian alam yang menyebabkan genangan air pada suatu wilayah akibat curah hujan tinggi, sungai meluap, atau tanggul jebol.
- **Evakuasi:** Proses pemindahan penduduk dari area berisiko tinggi ke tempat yang lebih aman.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- **Koordinator Penanggulangan Bencana:** Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanganan banjir.
- **Tim Evakuasi:** Bertanggung jawab untuk evakuasi penduduk.
- **Tim Medis:** Memberikan layanan kesehatan darurat.
- **Tim Logistik:** Menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan selimut.

5. Prosedur Penanganan Bencana Banjir

5.1. Tanggap Darurat

1. Peringatan Dini:

- ✓ Memantau kondisi cuaca dan level air sungai.
- ✓ Menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat melalui media komunikasi seperti sirene, media sosial, dan radio.

2. Evakuasi:

- ✓ Memobilisasi tim evakuasi untuk membantu penduduk pindah ke tempat yang lebih aman.
- ✓ Menetapkan titik kumpul dan jalur evakuasi yang aman.
- ✓ Menyediakan transportasi darurat untuk penduduk yang membutuhkan.

3. Pelayanan Medis dan Kesehatan:

- ✓ Mendirikan posko kesehatan di tempat penampungan sementara.
- ✓ Memberikan pertolongan pertama dan layanan kesehatan kepada korban banjir.

4. Logistik:

- ✓ Menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan selimut.
- ✓ Mendistribusikan bantuan logistik ke tempat penampungan sementara.

5.2. Pemulihan Pasca Bencana

1. Pemulihan Infrastruktur:

- ✓ Memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- ✓ Menyediakan air bersih dan sanitasi di area terdampak.

2. Rehabilitasi Lingkungan:

- ✓ Melakukan pembersihan area terdampak dari lumpur dan sampah.
- ✓ Rehabilitasi lahan yang rusak akibat banjir.

3. Dukungan Psikososial:

- ✓ Memberikan layanan konseling dan dukungan psikososial kepada korban banjir.
- ✓ Mengadakan kegiatan yang membantu pemulihan mental dan emosional korban.

6. Dokumentasi dan Pelaporan

• Dokumentasi:

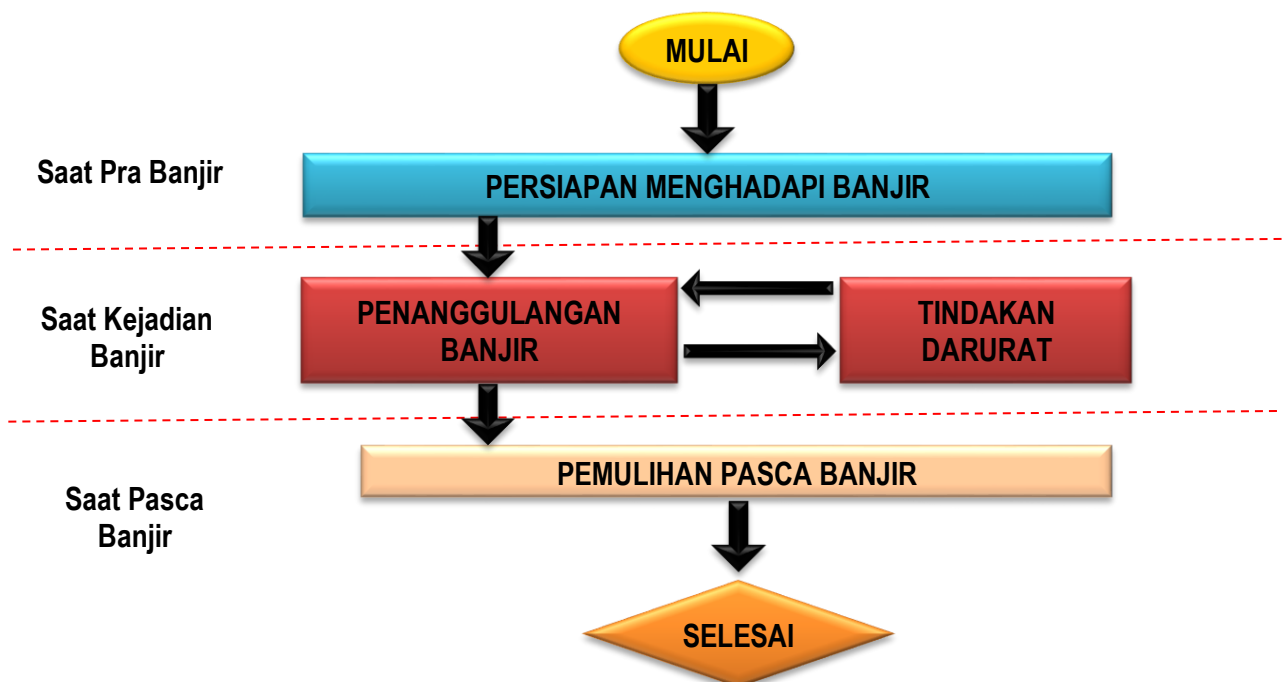
- ✓ Mencatat semua kegiatan penanganan banjir secara rinci.
- ✓ Membuat laporan harian tentang situasi dan perkembangan penanganan bencana.

• Pelaporan:

- ✓ Menyusun laporan akhir penanganan bencana yang mencakup evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan.
- ✓ Melaporkan hasil penanganan bencana kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.

7. Penutup

SOP ini harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan efektivitas penanganan bencana banjir.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN BENCANA BANJIR

Bila ada BENCANA

1. Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD;
2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalaksa BPBD;
3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat. Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :
 - a. Hasil Kajian berupa analisa dan resume terkait karakteristik Bencana skala kecil, sedang dan besar.
 - b. Melakukan rapat terpadu dengan pimpinan dan instansi terkait sehubungan dengan penetapan status bencana banjir
5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat
 - a. Ya/Tidak
 - i. Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
 - ii. Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
6. Bila rekomendasi tidak ditetapkan Status darurat maka hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada
7. Bila rekomendasi ditetapkan Status darurat Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Dharmasraya
 - a. Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan bisa diperpanjang bila diperlukan
 - b. Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan.
8. Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - a. Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat

10. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat

- a. Pengajuan Dana Tanggap Darurat dapat menggunakan Dana Tak Terduga dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang berlaku dan atau pengajuan Dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 6.A Tahun 2011
- b. Memenuhi Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Tak terduga sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak terduga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
- c. Memenuhi Syarat – syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

11. Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG

- a. SK Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Status Darurat Bencana Banjir
- b. Surat-surat pendukung lainnya
- c. Pengambilan beras

12. Langkah-langkah Penanganan darurat antara lain:

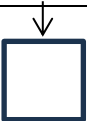
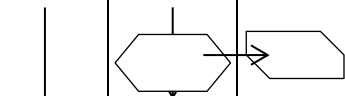
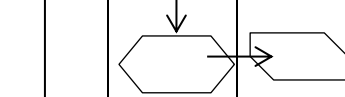
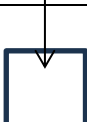
- a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan Pencarian dan Evakuasi korban, TAGANA dan sumberdaya lainnya yang di koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Dharmasraya
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar; Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.
- c. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompo rentan menjadi perioritas.Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.
- d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat seperti kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yg menghubungkan kedua wilayah tersebut.

13. Evaluasi/ Laporan Pertanggung Jawab Pembuatan Laporan Pertanggung jawab

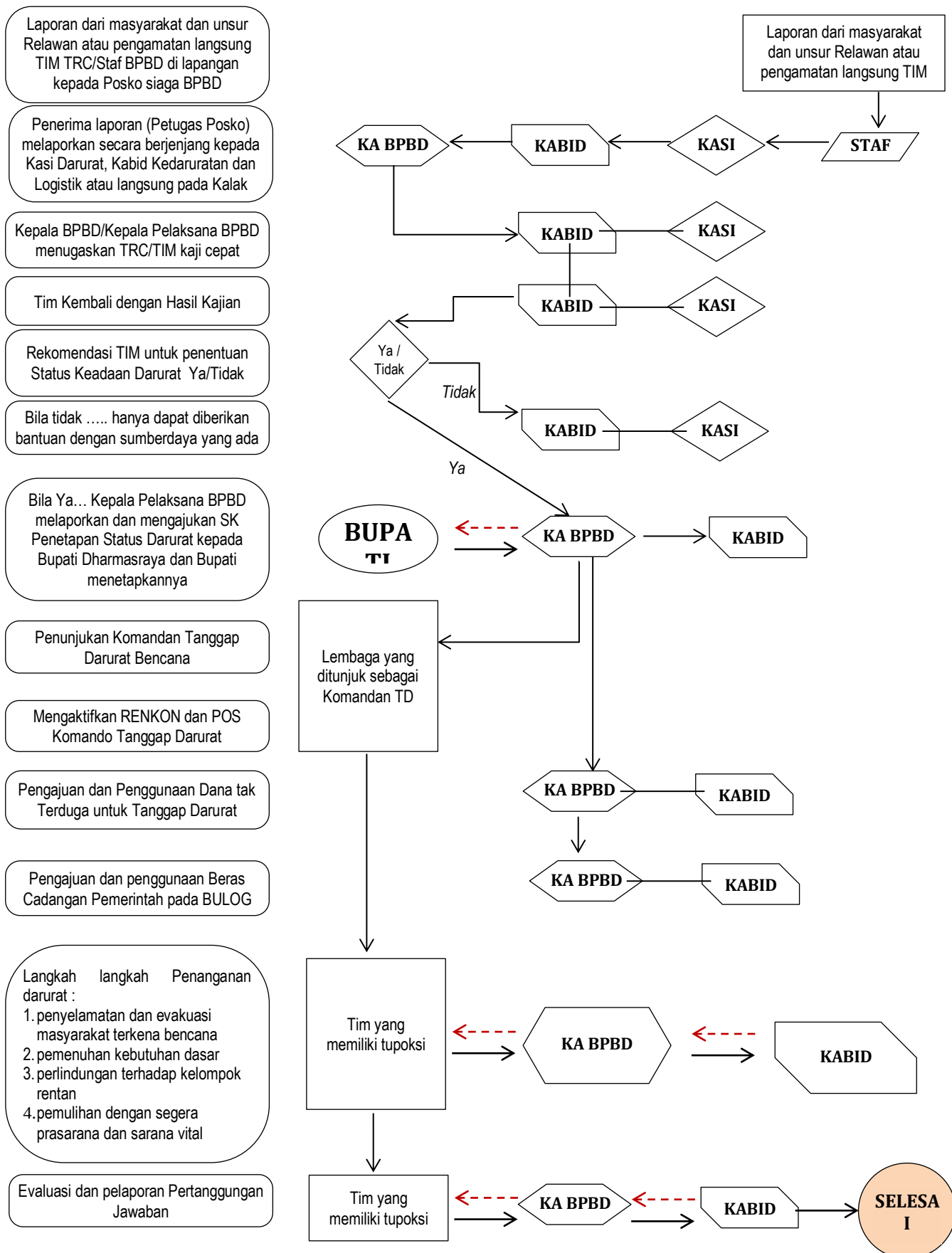
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya NIP.....
	Nama SOP	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang PB 2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang PB 3. Perka BNPB No.10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat. 4. Perka BNPB No.10 tahun 2012 tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya	1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab 2. Mengetahui mekanisme dan prosedur	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
1. Masyarakat dampak bencana 2. Aparat Pemerintahan 3. OPD dan Lembaga terkait	1. Komputer/ Leptop 2. Peralatan Dokumentasi 3. Kendaraan roda dua/empat 4. HT 5. HP 6. Jas Hujan 7. Sepatu Boot 8. ATK Gudang	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filing cabinet sebagai arsip 2. Perlunya penguatan koordinasi antar bagian yang tidak akan menghambat kinerja	Membuat berita acara penyerahan bantuan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

	Uraian Prosedur Kegiatan Bidang kedaruratan	Pelaksana					Baku Mutu			Ket
		Bupati/ Lembaga Lain	Ka BPBD	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan dari masyarakat dan unsur Relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD					Mulai	HT HP ATK			Kabid terkait dan Semua Staf BPBD
2	Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Darurat, Kabid Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak						HT HP ATK			Kabid terkait dan Semua Staf BPBD
3	Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat						ATK, pedoman, kendaraan			Kabid terkait dan Semua Staf BPBD
4	Tim Kembali dengan Hasil Kajian						ATK			
5	Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat.. Ya/Tidak	Ya / Tidak					ATK			
6	Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumberdaya yang ada						ATK			Kabid terkait dan Semua Staf BPBD
7	Bila Ya... Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Dharmasraya dan Walikota menetapkannya						ATK			Sekretaris dan Semua Kepala Bidang
8	Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana						ATK			

9	Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat						ATK, agenda buku			
10	Pengajuan dan Penggunaan Dana tak Terduga untuk Tanggap Darurat						ATK			Sekretaris dan Kepala Bidang
11	Pengajuan dan penggunaan Beras Cadangan Pemerintah pada BULOG						ATK			Sekretaris dan Kepala Bidang
12	Langkah langkah Penanganan darurat : 1. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 2. pemenuhan kebutuhan dasar 3. perlindungan terhadap kelompok rentan 4. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital						ATK, Kendaraan, bahan dan peralatan logistik	Selama masa Tanggap Darurat	• Terdata dan terlindunginya korban • Terpenuhi kebutuhan dasar • Tertangani kelompok rentan • Berfungsinya sarana prasarana.	BPBD / OPD / SAR / TNI / POLRI / Relawan / Lembaga lain
13	Evaluasi dan pelaporan Pertanggung Jawaban								Tahap akhir Masa tanggap darurat berakhir.	

Alur Protap Kedaruratan



LAMPIRAN - G: LEMBAR KOMITMEN

-----KOP SURAT KABUPATEN/KOTA-----

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi		
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya sekali setiap tahun		
4	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
5	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		
6	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
7	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan		

(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)
(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)	(nama, tanda tangan, dan nama lembaga/instansi)

LAMPIRAN - H : PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI

LAMPIRAN

Tabel D.2 - Lembar profil lembaga/organisasi

PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYUSUN

1	Nama Lembaga/Organisasi	
2	Alamat No. Telpon/Fax E-mail	
3	Tugas pokok/mandat lembaga/instansi/organisasi	
4	Kontak	
5	Jabatan No. Telpon/HP	
6	Tugas pokok/mandat dalam lembaga/instansi/organisasi	
7	Tugas dalam menyusun rencana kontingensi	
8	Cakupan wilayah kerja	
9	Kemampuan sumberdaya yang dimiliki/diakses/dikontrol	
10	Kemampuan lainnya	